



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010

Lampiran : 1 (satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 ayat (3) huruf d;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010.**

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.
- (4) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Papua Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Papua Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Papua Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang antara lain termasuk di dalamnya kondisi ekonomi tahun 2008 dan perkiraan 2009, tantangan dan prospek perekonomian daerah 2009, arah kebijakan ekonomi daerah, analisa perkiraan sumber pendanaan, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD...../3

- (2) RKPD Provinsi Papua Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. pedoman bagi Badan/Dinas/Biro dan Kantor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2010;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.
- (3) Uraian secara rinci RKPD dimuat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2010 :

- a. Pemerintah Provinsi Papua menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua;
- b. Badan/Dinas/Biro dan Kantor menggunakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Badan/Dinas/Biro dan Kantor dengan DPRP Provinsi Papua.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari : Badan/Dinas/Biro dan Kantor, membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Kepala BAPPEDA Provinsi Papua paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA Provinsi Papua menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2010 dengan RKPD Provinsi Papua Tahun 2010.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Juni 2009

GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Juni Tahun 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, M.M
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2009 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM

J.K.H ROEMBIAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Dirjen Depdagri di Jakarta;
4. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
5. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Dirjen PUMDA Depdagri di Jakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta;
8. Ketua BPK Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
11. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Tahun Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu RKPD di susun sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

RKPD Provinsi Papua tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua dan merupakan kelanjutan RKPD tahun 2009. Di mana dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011 telah ditetapkan 4 (empat) agenda Pembangunan yaitu :

1. Agenda Menata Kembali Pemerintahan Daerah;
2. Agenda Membangun Tanah Papua Yang Damai Dan Sejahtera;
3. Agenda Membangun Tanah Papua Yang Aman Dan Damai
4. Agenda Meningkatkan Dan Mempercepat Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Keempat agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan pilar pokok untuk mencapai visi pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKPD.

RKPD tahun 2010 berisi kebijakan pembangunan, baik yang terkait dengan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, perkembangan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2010 di susun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang berada di kampung-kampung.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang lebih luas dimaksudkan adalah tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan masyarakat Papua agar dapat mengatur sumberdaya dan kekayaan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat Papua. Kewenangan yang luas yang diperoleh ini merupakan tantangan yang besar dan perlu dijawab melalui berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang mampu mencirikan kekhususan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

RKPD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilakukan melalui pelibatan partisipasi masyarakat.

Di dalam penjabarannya, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah memuat prioritas dan rencana kegiatan beserta pagu indikatif belanja program dalam rangka mewujudkan target kinerja agregat(makro).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010;
18. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2006-2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2008 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan perencanaan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana klausul ayat 1 pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan maksud tersebut, maka RKPD Tahun 2010 sebagaimana amanat UU 25 tahun 2004 pasal 26 ayat 2 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Provinsi Papua dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman penyusunan RAPBD Provinsi Papua tahun 2010;
2. Pedoman SKPD Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), baik yang didanai oleh APBD Provinsi maupun APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
3. Acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran(KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2010, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
4. Pedoman Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota;

Selain itu penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar fungsi dan sub fungsi pembangunan, antar urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2008
- 2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

- 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009
- 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2010
- 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.4 Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
 - 3.4.1 Dana Desentralisasi/APBD
 - 3.4.2 Dana Dekonsentrasi/APBN
 - 3.4.3 Dana Tugas Pembantuan/APBN
 - 3.4.4 Dana Otonomi Khusus/APBN
- 3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan daerah
 - 3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

- 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN

- 6.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 6.2 Kaidah-Kaidah Pembiayaan

BAB VII PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2006-2011 memuat Visi Pemerintah Provinsi Papua yaitu : "Membangun Papua Baru" yang dijabarkan dalam misi :

1. Menata Kembali Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta menerapkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) pada semua jajaran dan tingkatan. Sejalan dengan itu akan dilakukan pula penataan terhadap kehidupan politik dan masyarakat yang demokratis, dewasa dan bermutu, berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
2. Membangun Tanah Papua yang Damai dan Sejahtera, dilakukan melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian harus diberikan kepada rakyat yang hidup di kampung-kampung dan daerah terpencil serta rakyat miskin di daerah perkotaan.
3. Membangun Tanah Papua yang Aman dan Damai (Provinsi Papua), yang dimaksudkan rakyat ikut serta memelihara dan menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, tertib dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.
4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) di seluruh Tanah Papua, meliputi pembangunan prasarana perhubungan/transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi terpadu (darat, laut, sungai dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi dan ketersediaan sistem telekomunikasi yang cukup memadai bagi seluruh rakyat.

2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Untuk memudahkan analisa kinerja pembangunan Provinsi Papua, akan disajikan menurut bidang-bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana.

2.2.1 Kinerja Makro Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Papua pada Tahun 2007 mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan pencapaian sebesar 4,28 % setelah mengalami kontraksi sangat tinggi -17,20 % pada tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi Papua termasuk tambang yang demikian disebabkan tumbuhnya produksi sektor pertambangan pada tahun 2007 sebesar 0,57 %, setelah mengalami kontraksi yang tinggi pada tahun 2006 sebesar -31,38 %.

Selama periode enam tahun terakhir dari 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Papua sangat berfluktuasi dan tidak beraturan, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan produksi tambang konsentrat tembaga yang juga sangat berfluktuasi, sementara sumbangannya sangat besar rata-rata 65,92 %. Sehingga gerak lajunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua.

Pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang pertumbuhannya akan nampak stabil, berbeda signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Papua dengan tambang baik dari besaran maupun trend pertumbuhannya. Sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang adalah sektor pertanian. Sektor inilah yang menghidupi masyarakat Papua pada umumnya, dengan sumbangan PDRB Papua rata-rata sebesar 36,67 %.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional yang sebesar 6,32 %, pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang tahun 2007 sebesar 8,66 % masih lebih tinggi.

TABEL 2.1
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2006-2008 (ADHK) TAHUN 2000

TAHUN	TERMASUK KONSENTRAT TEMBAGA	TANPA KONSENTRAT TEMBAGA
2006	-17,20	8,71
2007	4,28	8,66
2008	-4,39	8.34

Sumber : BPS Tahun 2008 dan Laporan Bank Indonesia tahun 2008

b. PDRB Perkapita

Nilai PDRB Perkapita Papua tahun 2007 termasuk tambang sebesar 27,47 juta rupiah, meningkat 17,20 persen dari tahun 2006 yang senilai 23,44 juta rupiah. Melihat nilai PDRB Perkapita yang ditimbulkan di Papua termasuk tambang terlihat cukup besar untuk digunakan sebagai ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah, namun besaran angka tersebut secara riil belum dapat dinikmati oleh penduduk Papua pada umumnya dikarenakan sebagian besar merupakan milik dari faktor produksi utamanya PT. Freeport Tembapapura.

Nilai PDRB Perkapita tanpa tambang akan nampak realistis untuk diamati karena tingkat kemakmuran masyarakat Papua akan nampak secara nyata.

Maka nilai PDRB Perkapita tahun 2007 tanpa tambang sebesar 8,67 juta rupiah atau sisa sepertiga dari PDRB termasuk tambang, meningkat dari tahun 2006 yang senilai 7,39 juta rupiah. Sehingga nampaklah trend nilai PDRB Perkapita Papua tanpa konsentrat tembaga menunjukkan trend pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya.

PDRB perkapita Papua tahun 2007 menunjukkan angka sebesar 26,63 juta rupiah, meningkat sebesar 13,62 persen dari tahun 2006 dengan PDRB perkapita 23,44 juta rupiah. Seirama dengan perkembangan nilai PDRB Papua termasuk tambang, maka pertumbuhan PDRB perkapita juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi tidak beraturan. PDRB perkapita tanpa tambang, nilai dan trend perkembangan pertumbuhan nampak lebih riil. Nilai PDRB perkapita tahun 2007 Papua tanpa tambang sebesar 8,37 juta rupiah menunjukkan perkembangan rata-rata selama lima tahun sebesar 13,80 persen dari tahun 2003 senilai 5,09 juta rupiah.

c. Inflasi

Angka inflasi tahun 2008 di wilayah Papua yang diproksi dengan laju inflasi kota Jayapura tercatat pada level yang cukup tinggi mencapai 12,55 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2007 yang mencapai 10,35 persen. Hal ini dipicu oleh laju inflasi kelompok bahan makanan, peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran sehingga menyebabkan kenaikan harga terutama pada komoditas-komoditas yang termasuk pada kelompok bahan makanan. Dan diperkirakan inflasi di wilayah Papua pada tahun 2009 masih berada pada level yang cukup tinggi, yang diperkirakan akan disumbang oleh kelompok bahan makanan, faktor lain yang memiliki potensi laju inflasi adalah cuaca dan ancaman badai dilautan yang sangat berpotensi menyebabkan laju inflasi yang tinggi. Namun laju Inflasi di kota Jayapura dapat ditekan dengan menurunnya harga-harga akibat faktor supply dari luar wilayah Papua semakin besar dan produksi dalam daerah semakin meningkat serta penurunan biaya pengiriman akibat turunnya harga minyak dunia.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Konsep indeks pembangunan manusia adalah mengukur pencapaian keseluruhan suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 dimensi yaitu : angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan paritas daya beli. Dari segi kualitas manusia, di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2005 IPM Papua 62,1 meningkat menjadi 62,8 di tahun 2006. Namun perkembangan IPM Provinsi Papua masih berada pada posisi paling rendah di Indonesia atau di bawah IPM Papua Barat yaitu sebesar 66,1 hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan, kesehatan dan perekonomian menjadi perhatian yang serius di tahun 2009 nanti dalam pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komperatif mengenai tingkat Pencapaian Pembangunan Manusia, IPM dibentuk dari tiga indikator utama yang disebut dengan indeks komposit. Ketiga indikator utama tersebut meliputi (1) Angka Harapan Hidup (2) Indeks Pendidikan (3) Pengeluaran Per Kapita Ril yang Disesuaikan. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Kinerja pembangunan manusia Provinsi Papua tercermin pada angka IPM tahun 2007 yang mencapai 63,41 lebih tinggi dari capaian tahun 2006 yaitu 62,8. Dengan capaian IPM 63,41, maka Provinsi Papua ada pada kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Bawah. Jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu sebesar 69,6 kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua masih sangat tertinggal, dan jika dibandingkan dengan 32 Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Papua menempati urutan terakhir, yaitu urutan ke 33. Berikut disampaikan IPM dan komponen utama yang telah dicapai dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai (maksimum dan minimum).

TABEL 2.2
CAPAIAN IPM DAN KOMPONEN UTAMA IPM
PROVINSI PAPUA TAHUN 2006 - 2007

NO	URAIAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	NILAI MAKSIMUM DAN MINIMUM	
				MAX	MIN
1.	IPM	62,8	63,41		
2.	Angka Harapan Hidup	67,60	67,90	85	25
3.	Angka Melek Huruf	79,31	75,41	100	0
4.	Rata-rata Lama Sekolah	6,3	6,52	15	0
5	Pengeluaran Ril Per Kapita	589.300	593.420	732.720	360.000

Sumber : BPS Provinsi Papua

Dari data indikator IPM yang tertera dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2007, sekalipun juga dibandingkan dengan nilai maksimum maka masih jauh tertinggal, seperti angka harapan hidup di Provinsi Papua mencapai 67,90 tahun artinya rata-rata umur penduduk di Papua kurang lebih 68 tahun, kondisi ideal yang diharapkan adalah 85 tahun.

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 75,41 persen. Artinya di Provinsi Papua masih terdapat sekitar 25 persen penduduk berusia 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Rata-rata lama sekolah sebesar 6,52 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Papua baru mencapai 6,52 tahun dari kondisi ideal yang diharapkan sebesar 15 tahun. Dengan demikian rata-rata penduduk di Provinsi Papua masih setara SLTP, sementara besarnya pengeluaran ril per kapita yang disesuaikan mencapai Rp. 593.420,- nilai maksimum yang seharusnya dicapai adalah Rp. 732.720,-.

e. Tingkat Pengangguran

Jumlah pengangguran pada tahun 2006 sebanyak 104.747 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 989.594 orang. Pada tahun 2007 jumlah penganggur sebanyak 49.674 orang atau menurun sebesar 52,58 %, sedangkan jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 990.774 orang atau 0,12 %. Persentase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 5,01 %, menurun dari Tahun 2006 yang mencapai 76,54 %.

TABEL 2.3
PENDUDUK 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN
PROVINSI PAPUA TAHUN 2006 - 2007

Jenis Kegiatan	2006	2007
Angkatan Kerja	1989.594	990.774
Bekerja	884.847	941.100
Pengangguran	104.747	49.674
Bukan Angkatan Kerja	297.638	303.720
Sekolah	99.759	119.333
Mengurus RT	175.032	150.255
Lainnya	22.847	34.132
Total Penduduk 15 +	2.287.232	1.294.494
TPAK	68,98	12,60
TPT	76,54	5,01

Sumber : BPS Provinsi Papua 2008

f. ICOR

ICOR merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat efisiensi suatu investasi. ICOR menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan / menambah satu unit output. Perekonomian Provinsi Papua dalam periode 1998-2006 diharapkan menjadi lebih efisien. Peningkatan efisien perekonomian ini diharapkan akan tercermin pada penurunan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara penambahan modal dengan jumlah pertambahan produksi.

TABEL 2.4
NILAI ICOR RATA-RATA PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 1998-2006

SEKTOR	MARJINAL	ICOR
Tanaman Perkebunan	0.2998	3.3352
Perikanan	0.8742	1.1440
Pertanian/Peternakan	0.3554	2.8135
Kehutanan	0.4151	2.4091
Pertambangan	0.1616	6.1879
Industri	0.2204	4.5378
Perhotelan/Pariwisata	0.3872	2.5826
Jasa Lain	0.2024	4.9412
Papua	0.2366	4.2262

Tabel 2.4 diatas menyajikan nilai ICOR untuk masing-masing sektor ekonomi yang dibangun berdasarkan persamaan linier. Disini ditampilkan dua koefisien yang sebenarnya mempunyai makna yang sama yakni marjinal dan ICOR. Angka marjinal diperoleh dari besaran koefisien regresi linier yang ditaksir, sedangkan ICOR merupakan kebalikan dari koefisien regresi. Ini berarti perbedaan diantara kedua koefisien tersebut terletak pada cara mengartikannya saja. Sebagai contoh dapat dilihat pada sektor perkebunan yang mempunyai koefisien marjinal sebesar 0.2998 dan ICOR sebesar 3.3352. Nilai marjinal sebesar 0.2998 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan investasi sebesar 1 rupiah di sektor perkebunan akan mendorong kenaikan nilai tambah regional sebesar 0.2998, atau dengan kata lain berdasarkan nilai ICOR sebesar 3.3352 menandakan bahwa untuk menciptakan kenaikan nilai tambah dalam perekonomian wilayah Papua sebesar 1 rupiah dibutuhkan pertambahan investasi sebesar 3.3352 rupiah pada sektor perkebunan. Berdasarkan perbedaan cara membacanya ini, terlihat bahwa angka ICOR lebih bermakna dan mudah diartikan dibandingkan marjinal. Oleh karena itu dalam pembahasan berikut akan digunakan indikator ICOR saja untuk mengamati kinerja sektor-sektor produksi dalam perekonomian wilayah Papua. Jika ditelusuri berdasarkan angka ICOR, dapat dikatakan bahwa sektor pertambangan tergolong sebagai sektor yang paling tidak efisien dalam perekonomian wilayah Papua. Oleh karena untuk menciptakan kenaikan nilai tambah regional sebanyak 1 rupiah dibutuhkan peningkatan investasi di sektor pertambangan sekitar 6.1891 rupiah. Beda halnya dengan sektor perikanan yang tampaknya bisa menjadi sektor paling efisien di Provinsi Papua, oleh karena memiliki ICOR terendah yakni sebesar 1.1440, dengan kata lain untuk meningkatkan nilai tambah regional sebesar 1 rupiah, hanya dibutuhkan investasi di sektor perikanan sebesar 1.1440 rupiah. Semestinya dengan penggunaan teknologi yang padat modal dalam sektor pertambangan, efisiensi produksi dapat dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor perikanan yang lebih mengarah kepada padat karya. Akan tetapi di Papua kondisinya sangat bertolak belakang, sektor pertambangan malah yang menjadi sektor paling tidak efisien dan sangat boros. Dimana berdasarkan standar nilai yang menggambarkan suatu sektor itu dikatakan efisien bila mempunyai ICOR lebih kecil atau sama dengan 4, maka dapat digeneralisasikan bahwa sektor pertambangan di Provinsi Papua mengalami kebocoran sebesar 35.36% akibat kinerja investasinya yang sangat tidak efisien. Padahal jika di lihat pada struktur ekonomi regional, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian wilayah Provinsi Papua, khususnya dalam menciptakan nilai tambah.

Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa bila diamati secara keseluruhan, perekonomian Papua juga ikut mengalami kebocoran. Meskipun tidak besar, namun dengan angka ICOR yang masih lebih tinggi dibandingkan angka normal yakni sebesar 4.2262 menandakan bahwa perekonomian wilayah Papua selama periode 1998-2006 rata-rata mengalami kebocoran sebesar 5.35% dari investasi yang ditanamkan. Beberapa sektor ekonomi lainnya yang tergolong tidak efisien dan bertanggung jawab terhadap kebocoran perekonomian regional adalah sektor industri yang mempunyai ICOR sebesar 4.5378 dan sektor jasa sebesar 4.9412. Kedua sektor ini masing-masing memberi kontribusi terhadap tingkat kebocoran perekonomian wilayah Papua rata-rata sebesar 11.85% yang berasal dari sektor industri, dan sebesar 19.05% dari sektor kehutanan.

Untuk sektor perkebunan, perikanan, pertanian/peternakan, kehutanan dan perhotelan/pariwisata, seluruhnya mempunyai nilai ICOR di bawah 3, yang berarti sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang efisien dalam perekonomian wilayah Papua, khususnya dalam periode 1998-2006. Disini terlihat jelas bahwa semua sektor yang berbasis pertanian di Provinsi Papua termasuk dalam sektor yang paling efisien. Oleh karena itu sudah sepatutnya investasi di sektor pertanian secara menyeluruh harus ditingkatkan pada masa-masa mendatang dengan cara mempromosikan pembangunan pertanian yang berbasis agribisnis sebagai motor pembangunan ekonomi wilayah.

Mengingat sumber daya ekonomi yang paling banyak dikuasai oleh rakyat dan menyebar merata di setiap daerah Propinsi Papua selama ini adalah sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, maka cara yang paling efektif untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan investasi dalam bidang agribisnis, bukan hanya meliputi subsistem *on-farm*, tetapi yang lebih penting lagi subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) dan subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*). Terciptanya sistem agribisnis yang kuat dan tangguh akan menaikkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian dengan lebih tinggi, sehingga pada akhirnya mampu mereduksi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang selama ini menjadi isu sentral publik yang belum terselesaikan dengan baik oleh Provinsi Papua. Beberapa kebijakan yang berpihak pada upaya untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian antara lain : (1) mendorong peran serta pihak swasta dalam kegiatan investasi di sektor perkebunan dan kehutanan, (2) menyederhanakan perijinan investasi, (3) membangun sarana dan prasarana penunjang investasi agar pihak-pihak swasta yang ada di wilayah Papua berkeinginan untuk melakukan re-investasi dari sebagian keuntungan yang diperoleh dari Papua, dan (4) pemberian bantuan modal dengan tingkat bunga yang rendah.

g. Tingkat Kemiskinan dan Gini Rasio

Pada periode 2004-2007 jumlah penduduk miskin cenderung menaik dari 966,8 ribu (38,69) Pada tahun 2004. Pada periode 2004-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menaik dari 966,8 (38,69 persen) pada tahun 2004 menjadi 1,028,2 ribu (40,83) pada tahun 2005. Pada periode 2006-2007 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 23,3 dari 816,7 ribu (42,52 persen) pada periode 2006 menjadi 793,4 ribu (40,78 persen) pada tahun 2007.

TABEL 2.5
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PAPUA
MENURUT DAERAH 2004-2007

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		
	KOTA	KAMPUNG	KOTA+KAMP	KOTA	KAMPUNG	KOTA+KAMP
2004	49,1	917,7	966,8	7,71	49,28	38,69
2005	53,0	975,2	1.028,2	9,23	50,16	40,83
2006	39,4	777,3	816,7	8,71	51,31	41,52
2007	35,4	758,0	793,4	7,97	50,47	40,78

Secara absolut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebesar 112,3 ribu sementara kabupaten Supiori merupakan wilayah yang jumlah penduduknya miskinnya paling sedikit yaitu sebesar 7,1 ribu jiwa.

Secara relatif kabupaten Puncak Jaya merupakan wilayah yang penduduknya miskinnya terbanyak yaitu sebesar 54,21 persen dan yang persentase penduduk miskinnya paling kecil adalah Kota Jayapura yaitu sebesar 25,69 persen.

h. Ekspor Impor

Keadaan ekspor Provinsi Papua pada tahun 2007 senilai 42,18 triliun rupiah meningkat sebesar 1,12 persen dari tahun 2006 yang senilai 41,71 triliun rupiah. Selama kurun waktu 2001-2007 nilai ekspor Papua nampak berfluktuasi tak beraturan. Lebih rinci dilihat menurut daerah tujuan ekspornya yakni luar negeri dan antar provinsi maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekspor luar negeri pada tahun 2002 menunjukkan angka 6,15 persen, meningkat pada tahun 2003 menjadi positif 13,19 persen kemudian tahun 2004 menunjukkan kontraksi pertumbuhan hingga -22,49 persen.

Tahun 2005 ekspor kembali tumbuh positif 12,58 persen dan 3,80 persen pada tahun 2006. Sedang pada tahun 2007, ekspor Papua kembali mengalami kontraksi sebesar 4,95 persen.

Sementara itu ekspor antar provinsi tahun 2002 menunjukkan pertumbuhan negatif -7,14 persen, meningkat pada tahun 2003 menjadi 17,80 persen, meningkat lagi pada tahun 2004 sebesar 20,54 persen, tahun 2005 pertumbuhan ekspor antar provinsi -10,71 persen, tahun 2006 tumbuh -1,29 persen dan mengalami pertumbuhan 0,47 persen pada tahun 2007. Naik turunnya ekspor baik luar negeri dan antar provinsi ini naik turunnya tergantung dari produksi tambang konsentrat, karena hampir 80 persen barang ekspor Papua adalah produksi konsentrat tembaga milik PT. Freeport.

Sementara impor tahun 2007 nilainya sebesar 28,16 triliun rupiah dengan peningkatan volume impor sebesar 13,19 persen, menuun signifikan dari tahun 2006 yang tumbuh 22,55 persen. Pertumbuhan impor luar negeri tahun 2006 sebesar 38,10 persen, tahun 2006 menurun sangat besar menjadi 15,64 persen. Sedangkan impor antar provinsi pertumbuhannya sebesar 11,04 persen sedikit melambat dari tahun 2006 yang tumbuh 11,56 persen.

2.2.2 Kinerja Makro Sosial Budaya

a. Pelayanan Pemerintahan

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pemerintah daerah baik Provinsi maupun kab/kota telah melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat, serta pendidikan formal, peningkatan pelayanan penyelenggaraan administrasi administrasi daerah, kapasitas pengelolaan keuangan daerah, pemberantasan KKN atau penyalahgunaan wewenang.

- c. Perdasi dan Perdasus yang dihasilkan
Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus adalah merupakan jawaban dari amanat UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus serta kemampuan pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa perdasi dan perdasus yang dihasilkan dapat memacu implementasi otsus secara sungguh-sungguh dan konsekuen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua.
- d. Angka Melek Huruf
Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat. Angka Melek Huruf Provinsi Papua pada tahun 2005 mencapai 86,55 persen, kemudian berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2006 meningkat mencapai 88,21 persen, tahun 2007 meningkat mencapai 90,00 persen. Berarti masih ada sekitar 10 persen penduduk Papua yang masih belum dapat membaca dan menulis atau buta huruf. Meskipun angka melek huruf Papua meningkat namun masih sangat rendah bila dibandingkan secara nasional, untuk nasional AMH tahun 2006 adalah 91,5 persen dan ABH sebesar 8,5 persen.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLTP/SLTA
Untuk angka partisipasi murni SD, SMP dan SMA Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun untuk tahun 2005 APM SD sebesar 88,93%, meningkat menjadi 90,2% pada tahun 2006, dan meningkat lagi menjadi 90,95% ditahun 2007. Untuk APM SMPD di tahun 2005 sebesar 53,85%, meningkat menjadi 53,86% pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 menurun menjadi 52,40%
Sedangkan untuk APM SMA ditahun 2005 menjadi 35,14%, menurun menjadi 35,11% di tahun 2006 dan di tahun 2007 menurun menjadi 34,94%. Angka Partisipasi Murni SMP dan SMA mengalami penurunan sangat dipengaruhi oleh alasan ekonomi, letak tempat tinggal jauh atau masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga banyak anak yang bekerja membantu orang tua untuk mencari nafkah.

TABEL 2.6
ANGKA PARTISIPASI MURNI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2006-2008 (%)

Uraian	2006	2007	2008
SD	88,93	90,20	90,95
SMP	53,85	53,86	52,40
SMU	35,14	35,11	34,94

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Papua

- f. Rasio Murid terhadap Guru/Sekolah

TABEL 2.7
RASIO MURID TERHADAP GURU

Uraian	2006	2007	2008
SD		429,61	
SMP		15,04	
SMU		12,97	

Sumber : PDA, tahun 2008

**TABEL 2.8
RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH**

Uraian	2006	2007	2008
SD		165,59	
SMP		221,95	
SMU		320,71	

Sumber : PDA, tahun 2008

g. Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran

Kematian bayi sangat dipengaruhi dan berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu dan perawatan bayi baru lahir serta jumlah sarana dan kualitas pelayanan kesehatan pada saat persalinan dan setelah bayi lahir. AKB diProvinsi Papua menunjukkan penurunan yang sangat tinggi, hal ini menunjukkan ada peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan sampai ke kampung dan digambarkan dengan adanya peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan serta adanya peningkatan cakupan pelayanan neonatus.

**TABEL 2.9
ANGKA KEMATIAN BAYI PROVINSI PAPUA
TAHUN (PER 1000 KELAHIRAN HIDUP)**

Uraian	Tahun 2002		Tahun 2007	
	Nasional	Papua	Nasional	Papua
Angka Kematian Bayi	35	56	34	41

Sumber : BPS, Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007

**TABEL 2.10
CAKUPAN PELAYANAN NEONATUS**

Uraian	2006	2007	2008
Cakupan Pelayanan Neonatus	51,79%	54,46%	57,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua

h. Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan sehat adalah pemenuhan Gizi bagi anak balita. Untuk tahun 2008 angka prosentase gizi buruk 7,1% dan gizi kurang sebesar 14,5%.

**TABEL 2.11
PROSENTASE GIZI BURUK DAN KURANG DI PROVINSI PAPUA**

Uraian	Tahun		
	1999	2003	2008
Gizi Buruk	9,6	3,7	7,1
Gizi Kurang	15,2	14,3	14,5

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua

i. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH sangat berkaitan dengan tingkat pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Bila pembangunan sosial ekonomi maju, maka AHH juga semakin baik.

Untuk tahun 2007 AHH Provinsi Papua adalah 67,51 tahun, masih di bawah angka nasional, namun jika dibandingkan dengan tahun 2002 65,20 tahun jadi ada peningkatan umur harapan hidup di Provinsi Papua periode 2002-2007. Meningkatnya AHH secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

TABEL 2.12
ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI PAPUA

URAIAN	TAHUN 2002		TAHUN 2007	
	Nasional	Papua	Nasional	Papua
Angka Harapan Hidup	66,20	65,20	69,09	67,51

Sumber : BPS

j. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) sangat berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran untuk berperilaku hidup dehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, terutama ibu hamil dan pelayanan kesehatan waktu melahirkan. Data tentang kematian ibu melahirkan di Provinsi Papua 396/100.000 KLH (survey cepat tahun 2001, metode WHO) masih sangat tinggi dibandingkan dengan angka nasional saat ini 228/100.000 KLH (Sumber BPS, hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2007). Tingginya AKI di Papua dipengaruhi oleh kondisi saat melahirkan seperti pendarahan, keterlambatan penanganan tenaga medis, dan sebab-sebab lainnya.

k. Persalinan oleh Tenaga Medis

Salah satu yang mempengaruhi tingginya angka kematian Ibu dan bayi adalah pertolongan persalinan oleh tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lainnya). Pada tahun 2006 persalinan oleh tenaga medis adalah 35,85 persen kemudian pada tahun 2007 adalah 52,27 persen (sumber: PDA tahun 2008) dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 49,99 persen. Ini berarti bahwa pada tahun 2008 masih terdapat sekitar 51 persen penduduk yang memanfaatkan jasa tenaga non-medis (dukun bayi atau keluarga) dalam membantu proses persalinan. Oleh karena itu ditahun mendatang aksesibilitas pelayanan kesehatan harus dapat menjangkau wilayah terpencil dan kampung-kampung diseluruh Papua.

l. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di provinsi Papua selalu mengalami kenaikan, dari 1.875.388 di tahun 2005 menjadi 2.000.738 pada tahun 2006 dan mencapai 2.015.616 di tahun 2007. dalam kurun waktu 2005 - 2007 penduduk terbanyak ada di Kabupaten Jayawijaya disusul oleh Kota Jayapura, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Supiori. Apabila dilihat kepadatan penduduk, Kota Jayapura adalah wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu lebih dari 200 penduduk/km², disusul oleh Kabupaten Biak Numfor dengan kepadatan lebih dari 40 penduduk/km². Selisih kepadatan penduduk yang cukup mencolok menunjukkan masih belum berimbangny penyebaran penduduk di Papua. Kabupaten Supiori adalah Kabupaten dengan kepadatan penduduk paling rendah, dimana kepadatannya tidak mencapai 1 penduduk/km², hal ini mungkin disebabkan karena Kabupaten ini adalah Kabupaten baru dimana infrastruktur belum semuanya selesai dibangun sehingga banyak pejabat pemerintah yang masih berdomisili di Kabupaten induknya yaitu Biak Numfor.

Pada kurun waktu 2000-2007 laju pertumbuhan penduduk Papua sebesar 2,75 Persen. Jadi setiap tahunnya penduduk bertambah sebesar 2,75 persen. Dengan pertumbuhan penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk Papua pada Tahun 2007 dengan luas wilayah 317.062 km² berarti kepadatan penduduk di Provinsi Papua mencapai 6,36 jiwa per Km² sehingga menjadi Provinsi di Indonesia dengan wilayah yang paling sedikit penduduknya.

TABEL 2.13
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI
PAPUA
TAHUN 2005-2007

No	Kabupaten	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk Per Km ²		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	Merauke	43,979	155,783	166,195	167,142	3.54	3.78	3.80
2	Jayawijaya	12,680	210,654	224,734	225,517	16.61	17.72	17.79
3	Jayapura	15,309	91,990	98,138	98,946	6.01	6.41	6.46
4	Nabire	16,312	161,519	172,315	173,159	9.90	10.56	10.62
5	Yapen Waropen	3,131	70,744	75,472	75,685	22.59	24.10	24.17
6	Biak Numfor	2,360	99,798	106,468	106,875	42.29	45.11	45.29
7	Paniai	14,215	112,881	120,426	120,654	7.94	8.47	8.49
8	Puncak Jaya	10,852	111,711	119,178	119,977	10.29	10.98	11.06
9	Mimika	20,040	126,430	134,881	139,036	6.31	6.73	6.94
10	Boven Digoel	28,471	31,443	33,545	33,716	1.10	1.18	1.18
11	Mappi	27,632	66,228	70,655	71,015	2.40	2.56	2.57
12	Asmat	18,976	62,002	66,146	66,483	3.27	3.49	3.50
13	Yahukimo	15,771	137,260	146,434	146,879	8.70	9.29	9.31
14	Peg. Bintang	16,908	88,529	94,446	94,733	5.24	5.59	5.60
15	Tolikara	8,816	44,180	47,133	47,276	5.01	5.35	5.36
16	Sarmi	25,902	31,593	33,705	34,017	1.22	1.30	1.31
17	Keerom	9,365	37,927	40,462	42,582	4.05	4.32	4.55
18	Waropen	24,628	21,647	23,094	23,209	0.88	0.94	0.94
19	Supiori	775	12,709	13,558	13,660	16.40	17.49	17.63
20	Kota Jayapura	940	200,360	213,753	215,055	213.15	227.40	228.78
Papua		317,062	1,875,388	2,000,738	2,015,616	5.91	6.31	6.36

Sumber : BPS Provinsi Papua

2.2.3 Kinerja Makro Infrastruktur

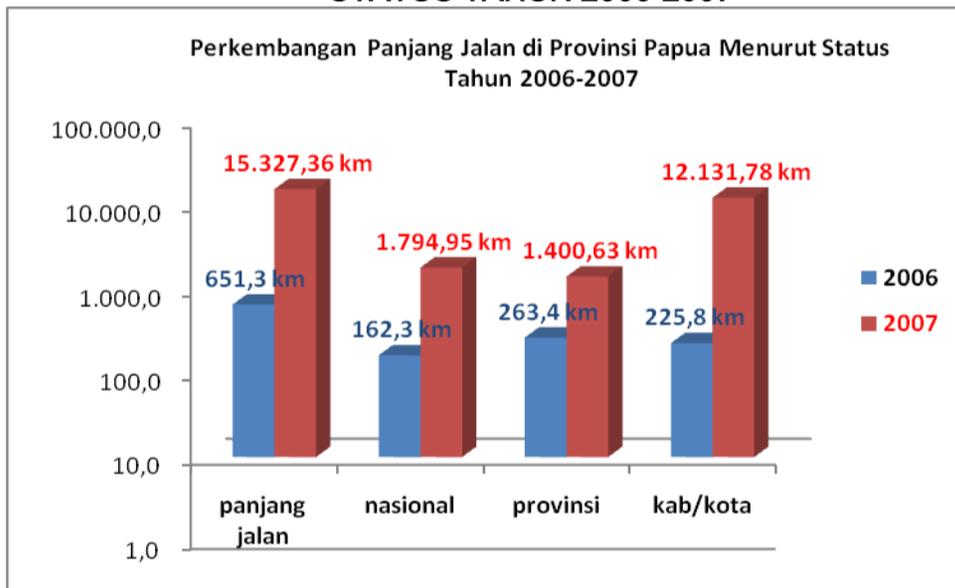
a. Fasilitas Perhubungan Darat

Salah satu tantangan pembangunan infrastruktur di Papua adalah permasalahan topografi dan konsentrasi penduduk yang berpencar dan tersebar dalam wilayah yang sangat luas. Kondisi seperti ini tentu saja membutuhkan pembangunan sistem transportasi terpadu antar kawasan dan juga pengembangan sarana, prasarana pendukung untuk memperlancar mobilisasi arus penumpang, barang dan jasa.

Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk didalamnya peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan raya perlu ditingkatkan baik volume maupun kualitasnya.

Pembangunan jalan di Provinsi Papua yang menghubungkan kawasan pegunungan tengah, pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan tumbuh cepat, dalam sistem transportasi terpadu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2007 panjang jalan telah mencapai 15.327,36 km dari tahun sebelumnya yang mencapai 651,43 km. Panjang jalan tersebut terdiri dari jalan nasional 1.794,95 km (naik 1.005%), jalan provinsi 1.400,63 km (naik 431%), jalan kabupaten/kota 12.131,78 km (naik 5.273%). Dari panjang jalan yang telah dibangun 5.099,29 km dalam kondisi baik (33,27%), kondisi rusak 1.546,28 km (10,09%) dan 8.745,79 km (57,06%) dalam kondisi rusak berat. Perkembangan pembangunan jalan di provinsi Papua dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

TABEL 2.14
PERKEMBANGAN PANJANG JALAN DI PROVINSI PAPUA MENURUT
STATUS TAHUN 2006-2007



Sumber PDA 2008

Untuk transportasi darat jumlah kendaraan bermotor tahun 2008 mencapai 100.998 unit (naik 24,32%) dibanding tahun 2003. Dari jumlah tersebut, 26.743 unit (26,48%) adalah mobil penumpang, 5.951 unit (5,89%) merupakan mobil barang, dan mobil bus sebanyak 358 unit (0,35%). Sementara jumlah sepeda motor sebanyak 67.946 unit (67,28%). Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2007 tercatat 606 kecelakaan (turun 48,27%) dibandingkan tahun 2006, dari jumlah korban tersebut, korban yang meninggal sebanyak 202 orang (37,33%). Sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas jalan raya mencapai 11.901 pelanggaran. Bila dilihat dari tingkat pelanggaran, maka kota Jayapura menempati urutan tertinggi sebanyak 4.664 pelanggaran (39,19%), diikuti Nabire sebanyak 2.128 pelanggaran.

b. Fasilitas Perhubungan Laut

Peran transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan masih sangat signifikan karena sebagian besar kebutuhan masyarakat berupa 9 bahan pokok maupun material untuk pembangunan diangkut menggunakan kapal. Kondisi transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan saat ini belum memadai namun inisiatif dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten untuk melakukan upaya perbaikan dan penambahan armada angkutan kapal serta sarana dan prasarana pelabuhan. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut telah terbangun 1 (satu) pelabuhan internasional, 25 (dua puluh lima) pelabuhan nasional, 1(satu) pelabuhan regional dan 78(tujuh puluh delapan) pelabuhan lokal, serta beroperasinya kapal PELNI 8 buah. Untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat di kawasan pesisir, sampai dengan tahun 2008 pengadaan fasilitas transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan serta fasilitas pelabuhan lainnya mengalami peningkatan khususnya pengadaan Kapal Perintis angkutan penumpang dan barang tercatat 13 unit (naik 160%) jika dibandingkan tahun 2005 yang baru berjumlah 5 unit kapal perintis. Sedangkan fasilitas lainnya seperti Bus Air sebanyak 5 unit, dermaga kayu dan penyelesaian dermaga penyeberangan masing-masing dermaga Logpond Dekai dan dermaga Depapre.

Jumlah kunjungan kapal yang beroperasi di wilayah Papua selama tahun 2006 mencapai 3.198 kapal atau naik 17,96% dibanding tahun sebelumnya dengan kapasitas 3,18 juta lebih. Dengan jumlah penumpang sebanyak 622.183 penumpang, dengan rincian penumpang tiba sebanyak 323.602 orang dan yang berangkat 298.581 orang. Pelabuhan Merauke merupakan pelabuhan dengan frekwensi kunjungan kapal terbesar yaitu sebanyak 1.563 kunjungan (36,60%), diikuti pelabuhan Jayapura sebanyak 680 kunjungan (15,93%). Dari kunjungan kapal tersebut, jenis pelayaran local mempunyai peranan yang cukup besar yaitu sebanyak 1.233 kunjungan (57,92%) diikuti jenis pelayaran lainnya dan Nusantara/perintis yang masing - masing sebesar 472 kunjungan (24,13%) dan 295 kunjungan (15,08%). Barang yang dibongkar antar pulau sebanyak 435,35 juta ton dan antar negara sebanyak 238,63 ribu ton dan barang yang dimuat antar pulau sebanyak 2,59 juta ton dan antar negara sebanyak 237,50 ribu ton.

c. Fasilitas Perhubungan Udara

Untuk saat ini peranan perhubungan udara di Provinsi Papua masih sangat dominan dalam mendukung pembangunan terutama bagi kawasan pegunungan tengah, merupakan satu-satunya alat angkut bagi arus penumpang dan barang. Pembangunan fasilitas transportasi Udara tahun 2006 - 2007 lebih difokuskan pada peningkatan fasilitas bandar udara. Demikian halnya pada tahun 2008 telah dibangun 8 unit bandar udara yang sebagian besar berada di kawasan pegunungan tengah dan selatan Papua. Sampai tahun 2008 terdapat 1 bandara internasional di Biak, 1 bandara khusus di Timika, 2 bandara domestik masing-masing di Jayapura dan Merauke serta kurang lebih 56 bandara perintis yang sebagian besar tersebar di daerah pegunungan tengah Papua.

Jumlah pesawat yang berangkat pada tahun 2006 tercatat 41.824 buah (naik 28,57%) dibanding tahun 2003 dan jumlah pesawat tiba tercatat 41.725 buah, (naik 20,10%) dibanding tahun 2003, dengan jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 611.433 penumpang (naik 79,93%) dan penumpang yang datang sebanyak 621.704 penumpang, (naik 66,56%).

Jumlah barang dan bagasi yang dimuat selama tahun 2006 mencapai 6.764 ton (naik 33,97%) dan 28.820 ton (naik 209,09%). Sementara itu jumlah barang dan bagasi yang dibongkar pada tahun 2006 mencapai 5.507 ton (naik 39,69%) dan 64.680 ton (naik 72,16%).

Sedangkan pos paket yang dibongkar mencapai 273,7 ton (turun 53,64%) dan paket pos yang dimuat sebanyak 140,4 ton (turun 60,58%).

d. Air Bersih

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat merupakan kebutuhan yang vital dan mutlak untuk kehidupan masyarakat. Pemenuhan air bersih/air minum belum merata diseluruh wilayah pemerintahan, terutama di wilayah pedesaan/kampung maupun sebagian wilayah perkotaan. Sebagian penduduk belum menikmati pelayanan air minum yang memadai terutama system perpipaan.

Pemasangan pipa air minum yang tersebar di beberapa wilayah perkotaan dan pedesaan/kampung sampai dengan tahun 2008 mencapai 145.372 M' yang dibiayai dari APBN dan APBD masing-masing 99.884 M' dan 45.488M'. Pipa yang terpasang tersebut meliputi pipa transmisi dan distribusi yang mendekati kepada konsumen/kelompok masyarakat. Sedangkan penyambungan ke rumah-rumah dilaksanakan oleh PDAM dan masyarakat sendiri. Selain itu pelayanan kebutuhan air minum penduduk di beberapa wilayah melalui pembuatan hidran/reservoir dan sumur/pompa. Sampai dengan tahun 2008 telah dibuat masing-masing 74 unit hidran/reservoir, 117 unit sumur/intek, dan pompa sebanyak 25 unit yang tersebar di pedesaan dan sebagian wilayah perkotaan.

e. Perumahan

Kondisi perumahan dan permukiman baik di kawasan perkotaan, pedesaan maupun di wilayah pedalaman dan terpencil didominasi oleh rumah dengan kondisi di bawah standar dan belum layak huni. Hal ini dilatarbelakangi oleh 1) pola permukiman masyarakat yang terpecah karena memiliki tradisi adat yang kuat; 2) ketersediaan sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak memadai sehingga membentuk kawasan kumuh (*slum area*); 3) kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah; dan 4) pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang berada pada kawasan lindung.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pemerintah telah membangun sekitar 13.429 unit rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat lokal. Selain itu dilakukan pemberian bantuan bahan non-lokal, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan fasilitas pendukung seperti penerangan kampung, jalan desa, rumah ibadah dan pelayanan kesehatan. Disamping itu keberpihakan kepada masyarakat guna perbaikan tingkat kesejahteraan sosial melalui pembangunan perumahan semakin meningkat dari waktu ke waktu, sejalan bertambahnya jumlah penduduk, khususnya bagi permukiman penduduk asli yang tersebar didaerah pedalaman.

f. Telekomunikasi

Peran telekomunikasi saat ini mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi wilayah tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Hasil-hasil pembangunan telekomunikasi hingga tahun 2007 antara lain meliputi:

a) Pos dan Giro

Jumlah kantor pelayanan jasa pos pada tahun 2007 mencapai 117 buah (turun 14,60%) dibandingkan dengan tahun 2006 yang tercatat 137 unit. Dari jumlah tersebut 29 diantaranya adalah kantor pos pembantu, 35 buah rumah pos dan 45 buah adalah kantor pos desa.

Jumlah pos paket yang dikirim pada tahun 2007 sebanyak 28.604 paket (naik 13,34%). Pada tahun 2007 pos paket yang diterima sebanyak 27.801 paket (naik 11,38%).

Dari jumlah tersebut 27.700 paket (49,64%) dari dalam negeri dan dari luar negeri sebanyak 101 paket (0,36%). Berbeda dengan banyaknya surat yang dikirim selama tahun 2007 mengalami penurunan yang hanya mencapai 1,21 juta pucuk surat atau turun 3,76% dibanding tahun 2006 yang tercatat 1,65 juta pucuk surat. Begitu pula dengan banyaknya wesel yang dikirim selama tahun 2007 mencapai 13.172 buah (turun 318,98%) dengan nilai Rp.10,82 miliar lebih (turun 362,20%), sedangkan yang diterima tercatat 70.181 buah (turun 77,48%) dengan nilai Rp. 6,25 miliar lebih (turun 99,18%).

b) Telekomunikasi

Jumlah sentral telepon otomatis pada tahun 2007 menjadi 9 unit dengan kapasitas 47.411. Sedangkan jumlah sambungan telepon otomatis pada tahun 2007 tercatat 27.265 sambungan. Sedangkan jumlah telepon umum pada tahun 2007 tercatat sebanyak 109 buah dan banyaknya wartel sebanyak 183 wartel. Pembangunan jaringan Telepon Nirkabel, telah dibangun di 17 kabupaten (63%) (telepon/Fax dari kantor Bupati ke Distrik/Kampung) masing-masing 112 Distrik dan 7 kampung. Pengembangan fasilitas Video Conference dan Multi Media baru terpasang di 4(empat) kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak dan Jayawijaya ditambah dengan Kantor Perwakilan Jakarta dan Gedung Negara. Sedangkan baseline data berbasis kampung se provinsi Papua dan pemutahiran data Web Pemerintah, Warnet dan Portal Papua pada tahun 2007 telah terlayani. Demikian pula dengan pengembangan / pembangunan Jaringan Komunikasi Daerah (JARKOMDA) di lingkungan pemerintah provinsi Papua telah terbangun Jaringan Komunikasi Provinsi dengan Wearles dan BTS pada kantor TVRI,SSB, POLDA, Peristirahatan Skeylen, 15 Lembaga Pendidikan, BMG, AL, BPS dan seluruh SKPD provinsi Papua dengan menggunakan Jaringan Fiber Optic. Selain itu pengembangan sumber daya manusia dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2008 telah diadakan pelatihan bagi guru-guru TIK Lembaga pendidikan disertai dengan pemasangan Jaringan Internet pada 5(lima) perguruan tinggi, 5(lima) SMA, dan 3(tiga) SMP. Pelatihan juga diberikan kepada 180 orang aparatur diantaranya 120 orang pejabat.

Diantara fasilitas telekomunikasi yang tersedia untuk akses informasi, Radio merupakan media dengan tingkat jangkauan tertinggi di Papua, dimana 52% dari seluruh penduduk di Papua memiliki akses kepada radio. Akses terhadap televisi adalah 41% diikuti dengan Koran, yakni 17%. Akan tetapi, cakupan media lebih tinggi secara signifikan di daerah perkotaan dimana akses kepada televisi sebesar 86%, radio 72% dan koran 38%. Namun perlu diperhatikan bahwa 34% dari jumlah penduduk Papua tidak memiliki akses terhadap media, dan kalau dilihat dari profil demografis itu angka lebih rendah lagi, yakni 43% masyarakat asli Papua tidak mengakses media apapun (Papua dalam angka 2008).

2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Dari evaluasi terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang pembangunan, telah diintrodusir berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu rumusan permasalahan pokok Papua yang diintrodusir dari permasalahan-permasalahan berbagai sektor pembangunan pada bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan

Pembangunan tanah Papua mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan telah banyak membawa perubahan terhadap wilayah dan penduduknya. Namun dari aspek pemerataan terlihat bahwa pembangunan masih lebih banyak terpusat di kota dan dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan masyarakat di kampung sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.

Kemampuan masyarakat dikampung untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar masih terbatas seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta transportasi masih terbatas. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat paling bawah. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung.

Kondisi kemiskinan akan memperparah terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar perkotaan dengan distrik dan kampung terutama diwilayah atau daerah pegunungan dan pedalaman. Kondisi kemiskinan ini disebabkan karena isolasi wilayah dan kesenjangan antar wilayah, rendahnya kualitas SDM, rendahnya pendapatan masyarakat karena terbatasnya lapangan kerja dan tidak adanya akses pasar yang memadai, serta terbatasnya investasi yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk baik di kampung, distrik maupun diperkotaan. Kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan masih bertumpu pada pertumbuhan semata tanpa memperhatikan pemerataan. Secara jelas permasalahan kemiskinan dan kesenjangan dapat dirinci sebagai berikut: :

- a) Masih tingginya perkembangan jumlah penduduk miskin;
- b) Tingginya ketimpangan dan tingkat kesenjangan antar wilayah serta antar perkotaan, distrik dan kampung;
- c) Masih adanya wilayah yang rentan dari bencana kelaparan;
- d) Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
- e) Belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat kampung.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan di fokuskan pada: **Pertama**, perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha. **Kedua**, upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sehingga perlu perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang pro-poor, termasuk **tata kelola pemerintahan yang baik**.

Dalam kaitan itu, untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pada tahun 2010 dititikberatkan pada upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, alokasi dana otsus yang menjangkau, menyentuh dan membangun semua kampung dan kelompok masyarakat miskin, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kampung dan mengoptimalkan peran kemitraan tiga tungku (agama, adat dan pemerintah) dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan/kampung. Serta mengembangkan peran Perempuan melalui upaya-upaya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

2.3.2 Belum optimalnya Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 telah menciptakan kesempatan dan peluang yang luas untuk melakukan perubahan ke arah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun pelaksanaan dari apa yang terkandung dalam UU Otsus belum terejawantahkan dalam pembangunan masih terdapat beragam kendala serius dalam implementasinya.

Paradigma pembangunan yang diafiliasikan telah mengalami *distorsi* yang berkepanjangan. Keberpihakan kepada Penduduk Asli Papua masih pada tataran wacana yang seringkali disuarakan oleh para elite dimana Penduduk Asli Papua belum dapat direalisasikan secara optimal. Padahal, keberpihakan pada konteks ini merupakan suatu konsekwensi logis dari proses reformasi yang menandai munculnya kesadaran politik terhadap hak-hak dasar Penduduk Asli Papua. Secara konkrit masalah yang harus dipecahkan pada tahun 2009 adalah :

1. Belum adanya persamaan persepsi tentang pelaksanaan otonomi Khusus antara pusat dan daerah, dan antar daerah itu sendiri;
2. Belum selesainya Penyusunan Perdasus dan Perdasi sebagai implementasi pelaksanaan Otonomi Khusus;
3. Pemekaran Provinsi dan Kabupaten yang tidak sesuai dengan UU 21 tahun 2001.

2.3.3 Rendahnya Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan pendidikan dan kesehatan, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan relatif belum memadai sampai ditingkat kampung, dan ini sangat dominan. Secara rinci dapat diklasifikasikan masalah dalam pendidikan dan kesehatan yaitu :

- Aksesibilitas Pendidikan
 - a) Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi.
 - b) Belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga kependidikan.
 - c) Kurangnya jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
 - d) Belum mantapnya sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
 - e) Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah.
 - f) Belum mantapnya penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
 - g) Belum optimalnya kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
 - h) Belum terselenggarakannya secara memadai pengembangan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh.
 - i) Belum optimalnya keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan bidang pendidikan dengan bidang lain serta antara Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Aksesibilitas Kesehatan
 - a) Mutu, ketersediaan, dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai terutama bagi masyarakat miskin, kampung dan yang tinggal di daerah terpencil;
 - b) Angka penularan HIV/AIDS yang terus meningkat dan memasuki kondisi yang mengkhawatirkan;
 - c) Angka kesakitan yang masih tinggi terutama karena penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, malaria, diare dan infeksi saluran pernafasan;
 - d) Masih tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya;
 - e) Belum optimalnya dukungan pelayanan kesehatan di bidang obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta
 - f) Perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat.

2.3.4 Rendahnya Tingkat Kemajuan Ekonomi Daerah.

Perekonomian Papua pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan namun perkembangannya masih lambat. Melalui berbagai program yang dilaksanakan belum mampu memberikan hasil yang cukup baik. Permasalahan di atas juga ditandai oleh belum Bergeraknya investasi sehingga masih lemahnya produksi barang yang berkualitas ekspor, semakin meningkatnya angka pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, masih lemahnya unit usaha dan lembaga ekonomi dalam mengembangkan produksinya, semakin melemahnya daya saing pengusaha dalam pasar bebas yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah. Oleh karena itu tantangan pembangunan untuk tahun 2010 adalah Mengembangkan Komoditas yg Berorientasi Pasar

1. Peningkatan secara cepat investasi dan daya saing ekspor
2. Mengembangkan Perusahaan Daerah
3. Pengelolaan SDA energi yang terbarukan

2.3.5 Minimnya Sarana Prasarana Infrastruktur

Masih tingginya ketimpangan wilayah di Papua antara kawasan pegunungan dan kawasan pesisir, antara perkotaan dan kampung, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana infrastruktur. Pembangunan jaringan transportasi terpadu yang dapat membuka akses untuk menerobos isolasi wilayah, maupun membuka akses keluar untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, permukiman penduduk dan perdagangan di dalam maupun di luar negeri masih sebatas transportasi melalui udara.

Diharapkan terbangunnya sarana prasarana infrastruktur akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, secara otomatis telah mendorong terbukanya daerah-daerah terisolasi dan membuka wilayah-wilayah distrik dan kampung. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tidak langsung juga telah mengakibatkan terbukanya akses secara kewilayahan di Provinsi Papua. Selain itu Pengembangan jaringan Transportasi mendukung pembangunan kawasan tumbuh cepat yang memiliki SDA yang sangat besar seperti Membramo untuk Pantai Utara Papua dan pantai Selatan Papua dimulai dari Kawasan Mimika sampai dengan Merauke.

2.3.6 Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Energi

Pengembangan energi di Provinsi Papua dihadapkan pada masalah kebutuhan yang terus meningkat, saat ini telah terjadi pemadaman secara bergilir, sehingga semakin menyebabkan menurunnya produktivitas dunia usaha utamanya kalangan mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu tantangan kedepan adalah mengembangkan pemenuhan energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik.

2.3.7 Rendahnya Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Issue strategis yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan sebagai akibat kerusakan sumberdaya hutan, maka menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat besar dengan terjadinya banjir dan tanah longsor.

2.3.8 Belum optimalnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta Ketertarikan dan Ketertiban

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat kepada hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, teratur dan berdisiplin.

Selain dimensi positifnya, reformasi telah memberikan pengalaman indikatif yang bersifat negatif. Dalam banyak kasus, hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di masyarakat seringkali tidak lagi terpolakan dalam kerangka tertib hukum formal dan hukum adat. Terjadi banyak pelanggaran hukum yang tidak saja disebabkan oleh : *Pertama*, ketidaktahuan sebagian masyarakat. Dewasa ini terdapat banyak versi produk-produk hukum yang belum tersosialisasikan kepada masyarakat, karena versinya selalu berubah dan tak jarang saling bertentangan, inkonsistensi dan saling tumpang tindih satu sama lain; *Kedua*, ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap norma-norma hukum sebagai wujud dari kekecewaan atas produk-produk hukum yang isinya tidak konsisten. Kondisi tersebut telah berimplikasi pada timbulnya degradasi moral hukum, longgarnya disiplin, dan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Terkait dengan hal ini, peranan lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada perlu ditingkatkan terus ke arah terciptanya sistem peradilan yang transparan dan terbuka, berkeadilan, tidak diskriminatif dan tegas.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban dan HAM dengan masyarakat Papua, dikenal bersifat multi-kultural yang sangat kaya dengan nilai-nilai adat dan budaya, terdiri dari berbagai etnis yang datang dari berbagai pulau di Indonesia dengan corak kebudayaan dan adat-istiadatnya masing-masing. Tidak kurang dari 300an etnis asli dan non asli Papua, hidup dan eksis bersama-sama yang mencirikan kemajemukan, keanekaragaman, mengagungkan perbedaan dan kesederajatan. Menjadikan Papua memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta adanya terorisme. Maraknya kasus pelanggaran HAM adalah cermin eksese-ekese yang terjadi akibat dari suatu kebijakan pembangunan yang hanya bersifat parsial, tidak menyeluruh, dan cenderung kuat bersifat eksklusif. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, melainkan harus ada perubahan orientasi pembangunan yang dapat menghantarkan kepada suatu kondisi kehidupan sosial yang berkesetaraan. Upaya berkesinambungan untuk mencapai tata kehidupan yang sederajat dan saling menghargai, memerlukan kearifan perlakuan.

2.3.9 Pembangunan Di Wilayah Perbatasan, Terpencil Dan Terisolir

Wilayah provinsi Papua yang berbatasan secara langsung dengan negara PNG serta dampak pembangunan yang melahirkan marginalisasi masyarakat, disparitas antar wilayah, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab pemicu maraknya kejahatan transnasional. Apalagi jika kondisi diperburuk oleh masih rendahnya nilai-nilai kejuangan dan wawasan kebangsaan. Hal seperti ini menjadi pendorong tingginya mobilitas penduduk secara ilegal (pelintas batas tradisional) ke negara tetangga, baik melalui darat maupun laut, serta maraknya pencurian kekayaan alam Papua (hutan, tambang, laut). Adapun masalah pembangunan wilayah perbatasan, terisolir dan terpencil adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan dari pemerintah baik untuk wilayah perbatasan, terisolir dan terpencil;
2. Belum optimalnya koordinasi pembangunan dalam mensinergikan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan, terisolir dan terpencil;
3. Masih dominannya pendekatan keamanan (security approach) dibandingkan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sangat berfluktuasi dan tidak beraturan. Keadaan demikian ini disebabkan oleh pertumbuhan produksi tambang konsentrat tembaga yang juga sangat berfluktuasi, sementara sumbangannya sangat besar rata-rata 65,07 persen sehingga gerak lajunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua.

Sementara itu apabila pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang pertumbuhannya nampak stabil, berbeda signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Papua termasuk tambang baik dari besaran maupun trend pertumbuhannya.

Apabila Papua tanpa tambang sektor yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah pertanian. Dan memang sektor inilah yang menghidupi masyarakat Papua pada umumnya, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Papua rata-rata sebesar 38,62 persen dan pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 35,54 persen. Namun apabila ditinjau dari pertumbuhan maka sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah, oleh karena itu pembangunan pertanian harus menjadi fokus pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2007 menunjukkan adanya pertumbuhan positif sebesar 11,1%, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tersebut meningkat bila dibandingkan pada tahun 2006 yang hanya tumbuh sebesar 8,71%. Pertumbuhan sebesar 11,1% didorong oleh percepatan pertumbuhan di semua sektor, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua berlangsung terus dan semakin membaik bila diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2000.

Angka inflasi tahun 2007 di wilayah Papua yang diproksi dengan laju inflasi kota Jayapura tercatat pada level yang cukup tinggi mencapai 10,34 persen lebih tinggi dari laju inflasi nasional yang mencapai 6,59 persen. Hal ini dipicu oleh laju inflasi kelompok bahan makanan, peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran sehingga menyebabkan kenaikan harga terutama pada komoditas-komoditas yang termasuk pada kelompok bahan makanan. Dan diperkirakan inflasi di wilayah Papua pada tahun 2009 masih berada pada level yang cukup tinggi, yang diperkirakan akan disumbang oleh kelompok bahan makanan, faktor lain yang memiliki potensi laju inflasi adalah cuaca dan ancaman badai dilautan yang sangat berpotensi menyebabkan laju inflasi yang tinggi. Inflasi juga akan dipengaruhi oleh meningkatnya harga-harga akibat faktor supply dari luar wilayah Papua yang terbatas dan kenaikan biaya pengiriman.

TABEL 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DAN
PERANAN SEKTORAL TERHADAP PDRB (ADHK 2000) DENGAN
TAMBANG PROVINSI PAPUA TAHUN 2008

NO	KELOMPOK SEKTOR	PERTUMBUHAN	KONTRIBUSI
1	Pertanian	4,18	16,89
2	Pertambangan dan Penggalian	47,37	51,64
3	Industri Pengolahan	9,57	2,49
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6,70	0,23
5	Konstruksi	20,89	6,35
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	11,42	6,40
7	Pengangkutan dan Komunikasi	14,07	6,10
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	7,94	2,31
9	Jasa-jasa	8,40	7,58
	PDRB	25,51	100

Sumber : BPS Provinsi Papua bekerjasama dengan KBI Jayapura

Jika ditinjau dari segi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua masih banyak disumbangkan dari konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan sebesar 22,11 persen, dikarenakan tuntutan pembenahan infrastruktur menyebabkan pemerintah harus lebih meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor strategis agar terpacu pertumbuhan ekonominya. Ini menandakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua masih sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Sedangkan peranan konsumsi Rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mengalami peningkatan dari 9,99 persen tahun 2006 menjadi 13,56 persen tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 15,76 persen tahun 2008 terutama disumbangkan dari konsumsi bahan makanan.

Peningkatan konsumsi Rumah tangga ini menunjukkan meningkatnya perbaikan ekonomi di daerah dan turunnya beberapa harga kebutuhan pokok serta semakin tingginya daya beli masyarakat. Sementara itu pertumbuhan ekspor dan impor mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor dan impor baik antar pulau maupun luar negeri. Pertumbuhan PMTB mengalami penurunan dari 11,48 persen tahun 2006 menjadi 8,03 persen tahun 2007 dan mengalami peningkatan ditahun 2008 sebesar 17,95 persen, menunjukkan bahwa kinerja atau kondisi investasi semakin membaik di Provinsi Papua.

TABEL 3.2

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB (ADHK 2000)
MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2008

NO	SEKTOR	PERTUMBUHAN	KONTRIBUSI
1	Konsumsi Rumah tangga	15,76	61,12
2	Konsumsi Lembaga swasta	14,20	1,65
3	Konsumsi Pemerintah	22,11	22,29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17,95	27,39
5	Perubahan Stok	25,36	-8,13
6	Ekspor	7,40	78,34
7	Dikurangi Impor	10,79	82,65
	PDRB	25,75	100

Sumber : BPS Provinsi Papua 2008

3.1.2 Proyeksi Makro Ekonomi tahun 2009 dan 2010

Gambaran ekonomi Papua tahun 2009 dan 2010 akan dipengaruhi lingkungan eksternal yang berkembang secara nasional sebagai berikut :

Pertama, memburuknya perekonomian dunia yang diawali dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang disebabkan oleh jatuhnya pasar surat utang "subprime mortgage" atau kredit kepemilikan rumah (KPR) di Amerika Serikat. Kejatuhan harga surat utang supprime mortgage membawa kerugian bagi bank dan perusahaan pengelolaan dana (*fund management*) yang membeli surat utang tersebut dan ternyata yang memiliki surat utang subprime mortgage bukan hanya perbankan di AS, tetapi ada juga perbankan di Australia, Singapura, Taiwan, China, atau di India. Akibatnya harga saham perbankan di seluruh dunia melemah. Berhubung dengan psikologi pasar selalu cenderung ekstrim, banyak pelaku pasar percaya bahwa meruginya perbankan akan berdampak kepada perlambatan laju pertumbuhan kredit dan perlambatan kegiatan ekonomi yang selanjutnya berdampak pada jatuhnya harga saham non-perbankan diseluruh dunia yang tentu saja mempengaruhi nilai perdagangan antar negara sehingga akan berpengaruh terhadap ekspor di Provinsi Papua.

Kedua, kesenjangan finansial global diperkirakan akan melebar kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan moneter internasional yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas moneter dalam negeri demikian juga Provinsi Papua.

Ketiga, persaingan perekonomian dunia yang semakin meningkat dan terintegrasi, sehingga menuntut daya saing perekonomian nasional lebih tinggi dan Papua khususnya. Demikian juga persaingan untuk menarik investasi asing terutama oleh negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin dalam upaya mendorong perekonomiannya.

Keempat, membaiknya kondisi ekonomi makro nasional di dukung oleh terjaganya laju inflasi dan suku bunga SBI yang makin kondusif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi indonesia.

Kelima, tingginya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Keenam, besarnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Papua adalah sebagai berikut :

- Pertama*, pelaksanaan rencana strategis pembangunan kampung (respek) yang memasuki tahun ke 4 (empat),
- Kedua*, meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
- Ketiga*, meningkatnya stabilitas keamanan dan kepastian hukum.
- Keempat*, tingginya partisipasi masyarakat terhadap seluruh kegiatan pembangunan.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2009 dan 2010

Gambaran ekonomi makro Papua Tahun 2009 dan 2010 akan sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan global, regional, nasional yang merupakan perkembangan eksternal seperti liberalisasi perdagangan dan kebijakan investasi pemerintah, kepastian hukum dan regulasi fiskal, moneter, dan perkembangan perekonomian daerah sendiri (internal) yang antara lain system pengelolaan anggaran yang lebih berhati-hati dan langsung diarahkan ke kampung dan distrik, serta pembenahan kelembagaan dari kaya struktur menjadi kaya fungsi dengan piramida terbalik, sehingga mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2009 diharapkan akan lebih baik dibanding tahun 2007 dan 2008, karena adanya investasi pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan, air bersih, energi dan lain-lain yang akan mendorong berbagai kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, selain itu juga karena pada tahun 2009 diharapkan dengan pembangunan kampung dan distrik yang memasuki tahun ke-4 (empat) akan mendorong kegiatan riil ekonomi masyarakat di kampung, distrik dan kota, karena sebagian besar dana pembangunan khususnya dana Otonomi Khusus akan diarahkan langsung ke kampung dan distrik yang kesemuanya akan memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua. Dengan adanya upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter, laju inflasi, nilai tukar dan tingkat suku bunga bank maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap prospek perekonomian Papua pada tahun 2009, sejalan dengan itu peran perbankan dalam mendorong sektor riil lebih nyata.

Dengan makin baiknya kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan di Papua akan mendorong masuknya investasi baru seperti perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa dan lain-lain. Selain itu juga perkembangan perkreditan di Papua akan semakin meningkat, hal ini ditunjukkan total penghimpunan dana masyarakat dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan di Papua pada triwulan IV-2008 mencapai Rp.19.430,47 miliar. Posisi DPK tahun 2008 tumbuh sebesar 15,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian UKM, Koperasi dan dunia usaha diharapkan akan semakin meningkat, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan di sektor riil.

Berdasarkan gambaran perekonomian yang disebutkan diatas dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang akan mempengaruhi perekonomian Papua, maka prospek pada tahun 2010 berupa :

a. **Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Makin Meningkat dan Berkualitas**

Dengan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terbuka dengan pembukaan lapangan kerja baru seperti dibidang pertanian, industri kecil dan rumah tangga, jasa-jasa, konstruksi, infrastruktur dan lain-lain akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin signifikan dan lebih tinggi dari tahun 2007, sehingga upaya pengurangan pengangguran dapat dikurangi secara bertahap dan berkesinambungan.

3.2.2 Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Signifikan dan Berkualitas

Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan, namun demikian tidak bisa diabaikan peranan sektor lainnya seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan hotel, pemerintah, dan perbankan,

namun diakui pula bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat juga semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

3.2.3 Terciptanya Stabilitas Ekonomi yang Mantap dan Terkendali.

Untuk menjaga momentum pembangunan, maka stabilitas ekonomi yang mantap pada tahun 2009 akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas serta berkesinambungan, untuk itu momentum ini harus dijaga dengan baik, dan sejalan dengan itu diharapkan inflasi dapat tetap bertahan pada tingkat yang terkendali dan lebih rendah dari tahun 2007. Selain itu, berkembangnya kegiatan pengelolaan sumber daya alam akan mendorong meningkatnya ekspor Papua.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dan melihat tantangan yang dihadapi, maka ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat berbasis kampung dan peningkatan upaya penanganan kemiskinan, melalui :

1. Mengembangkan perekonomian rakyat dengan komoditas-komoditas yang berorientasi pasar dengan nilai jual yang tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di kelurahan/ kampung dan kawasan miskin di perkotaan;
2. Melakukan terobosan langsung untuk menarik sumber-sumber dana dalam rangka penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri dengan rangsangan berbagai kemudahan dan fasilitas;
3. Melakukan terobosan langsung untuk membuka perdagangan, ekspor dan impor luar negeri ke Provinsi Papua melalui pintu-pintu masuk (KAPET) dengan rangsangan berbagai kemudahan dan fasilitas;
4. Mengembangkan program-program pembinaan kepada pengusaha kecil dan menengah (PKM) untuk menjadi pengusaha yang berbakat, semakin mampu dan mandiri;
5. Mengembangkan program-program pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, bermutu dan tepat guna;
6. Penguatan Pembangunan Kampung melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan kampung, dan pengembangan potensi kampung sebagai produk unggulan serta fasilitasi kemitraan;
7. Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
8. Pengembangan potensi pariwisata melalui peningkatan jaringan informasi wisata, peningkatan mutu obyek dan usaha jasa pariwisata dalam rangka meningkatkan daya saing regional dan global;
9. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul dan faktor penunjangnya;
10. Mengembangkan perusahaan-perusahaan daerah dalam mengelola sarana dan prasarana publik dengan pengelolaan yang baik dan efisien , sehingga memberikan nilai tambah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
11. Pemantapan reformasi birokrasi dibidang pelayanan publik serta kebijakan publik.

3.4. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan daerah

3.4.1 Dana Desentralisasi/APBD

Sumber-sumber dana desentralisasi berasal dari PAD dan Dana Perimbangan, di mana pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 2.080.725.000.000,- terdiri dari :

1. Pendapatan...../28

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat sekitar 25% atau mencapai Rp. 430.725.000.000,-
2. Dana Perimbangan di tahun 2009 sebesar Rp. 1.556.890.760.000,- diperkirakan pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Papua menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 1,6 trilyun, hampir sama dengan tahun lalu dengan peningkatan sebesar 5%.

3.4.2 Dana Dekonsentrasi/APBN

Dana Dekonsentrasi merupakan dana perencanaan dan keputusan besaran alokasi ditentukan oleh Pemerintah. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur melalui SKPD ditingkat Provinsi. Untuk tahun 2009 Provinsi Papua menerima dana dekonsentrasi sebesar Rp. 685.750.599.000,- dan pada tahun 2010 diperkirakan hampir sama dengan tahun lalu sebesar Rp. 700 miliar.

3.4.3 Dana Pembantuan/APBN

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Papua menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 315.122.660.000,- dan pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 350 miliar.

3.4.4 Dana Penerimaan Khusus (Otsus)

Sumber-sumber dana Penerimaan Khusus (Otsus) berasal dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari :

1. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan mencapai Rp. 700.000.000.000,- sama dengan tahun lalu.
2. Dana Tambahan Infrastruktur diperkirakan mencapai Rp. 800.000.000.000,- sama dengan tahun 2009.
3. Dana Alokasi Khusus diperkirakan mencapai Rp. 90 miliar, hampir sama dengan tahun lalu. Sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2010.

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah tersebut dirinci menurut organisasi SKPD, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

Menurunnya kinerja kondisi ekonomi makro nasional berpengaruh sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah yang paling terkena dampak adalah penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kendaraan baru. Tahun 2006 terjadi penurunan pendapatan. Namun demikian ada peningkatan pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Anggaran Pendapatan tahun 2010 diharapkan kondisi perekonomian akan membaik selain akan dilakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah. Memperhatikan kondisi tersebut di atas, kebijakan pendapatan daerah tahun 2010 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dengan laju pertumbuhan minimal 11,78% dengan asumsi prasyarat yang dibutuhkan untuk peningkatan retribusi daerah dipenuhi dan kondisi perekonomian makro membaik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan tersebut adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- b. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.

- c. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
- d. Pemantapan kelembagaan, sistem dan Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, kabupaten/kota, serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan

Peningkatan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui :

- a. Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- b. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTP;
- c. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Papua dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2010 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2010 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja urusan pilihan diprioritaskan pada sektor atau urusan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi sektor andalan Provinsi Papua.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- ❖ Penetapan Pagu pada setiap SKPD didasarkan pada Prioritas RKPD tahun 2010 dan target kinerja pada setiap SKPD.
- ❖ Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan hendaknya proporsional sesuai dengan prioritas pencapaian tahun 2010.
- ❖ Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang.
- ❖ Memaksimalkan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber APBN dengan APBD serta sumber pembiayaan lainnya dalam rangka efektifitas dan efisiensi belanja menurut sumber dana.

1. Kebijakan Belanja Langsung APBD Provinsi Papua tahun 2010

Belanja Langsung adalah alokasi belanja APBD Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam bentuk program. Alokasi belanja langsung tahun 2010 didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2010 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah 2010.
- b. Proporsi belanja difokuskan pada Peningkatan IPM Papua dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Daya beli.
- c. Untuk 6 (enam) Program pada setiap SKPD yang bertujuan untuk mendukung dan menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur, Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, akan dibiayai oleh sumber dana alokasi umum (DAU) dan diberikan batas maksimum sesuai dengan beban kerja setiap SKPD.
- d. Proporsi anggaran pendidikan dan Kesehatan dialokasikan sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Khusus serta sesuai dengan amanat UU tentang Pendidikan Nasional.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya tidak secara langsung melayani masyarakat, maka alokasi belanja langsung tidak dibiayai dari sumber Dana Otsus.
- f. Untuk Kebijakan Belanja SKPD Tahun 2010 adalah
 - Belanja Pegawai mempertahankan Pendapatan Riil Aparatur Negara dan Belanja Honorarium disesuaikan dengan toleransi kegiatan serta standar biaya
 - Belanja Barang dan Jasa sama dengan tahun 2009
 - Belanja Modal : Fokus pada Pengadaan Infrastruktur dan bukan pada Belanja Modal Peralatan Kantor

2. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota serta organisasi kemasyarakatan, kebijakan yang menjadi dasar alokasi bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota berupa block grant dan specific grant.
- b. Alokasi bantuan keuangan kabupaten dan kota dibagi menjadi Dana Penerimaan Otonomi Khusus (60%) dan Dana Bantuan Program.
- c. Dana Penerimaan Otsus dialokasikan untuk setiap kabupaten dan kota berdasarkan perhitungan indeks kabupaten dan kota dengan penilaian terhadap indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, proporsi pengangguran, PDRB per kapita dan pendapatan asli daerah.
- d. Dana bantuan program dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi pada kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan daerah.
- e. Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan sesuai tingkat kebutuhan yang dinilai berdasarkan kelayakan proposal yang diajukan.
- f. Kriteria bantuan harus berada dalam koridor sebagai berikut :
 - Mendukung secara signifikan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Papua
 - Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
 - Mendukung pembangunan kampung (Respek) dalam hal ini menanggulangi masalah kemiskinan, menanggulangi masalah pengangguran, pemberdayaan masyarakat (adat, agama dan perempuan).
 - Jaminan kesehatan dan pendidikan serta penanggulangan bencana

3. Kebijakan Belanja Khusus

Alokasi belanja dalam APBD juga dilaksanakan berdasarkan kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur yang antara lain terdiri dari :

- a. Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK)
- b. Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Makro (RESPIM)

3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh atau untuk memanfaatkan surplus. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Untuk itu kebijakan pembiayaan daerah adalah

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah pada akurasi, efektifitas, efisiensi, dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang di ambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan déficit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, atau penerbitan obligasi dan mengadakan pinjaman;
4. Pembiayaan APBD 2010 diasumsikan sama dengan tahun lalu
 - a. Penerimaan daerah terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
 - Transfer dari dana cadangan
 - Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
 - b. Pengeluaran daerah terdiri dari :
 - Transfer ke dana cadangan
 - Penyertaan modal ke Bank Papua
 - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

Pembangunan daerah tahun 2010, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010, maka prioritas-prioritas pembangunan Daerah tahun 2010 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mensinergikan pembangunan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2010.

Selanjutnya dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 dan memperhatikan target kinerja agregat tahun 2010 serta mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua 2006-2011, dalam rangka perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta sekaligus dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, maka prioritas agenda pembangunan RKPD Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pembangunan Kampung.
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Pengembangan Perekonomian Rakyat dengan Komoditas-Komoditas Berorientasi Pasar yang didukung oleh Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Daya Tarik Investasi.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi.
5. Penguatan Otonomi Khusus, Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Ketentraman, Supremasi Hukum dan Penegakan HAM.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2010

1. Peningkatan Pembangunan Kampung

Sasaran :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan pembangunan Kampung pada tahun 2010 adalah :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - ❖ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 30 - 35 persen;
 - ❖ Terlaksananya Rencana Strategis Pembangunan Kampung melalui PNPM Mandiri Respek: mencakup kampung dan distrik diseluruh Kabupaten/kota, serta meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi program penguatan dan pendukung PNPM Mandiri Respek ke dalam PNPM Mandiri Respek;
 - ❖ Meningkatnya perlindungan Sosial bagi masyarakat yang berfokus pada kampung.
- b. Kelembagaan Masyarakat dan pemerintah kampung
 - ❖ Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kampung;
 - ❖ Meningkatnya kelembagaan pemerintah kampung dalam pengelolaan pembangunan;
 - ❖ Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat kampung seperti lembaga agama, adat, perempuan dan pemuda yang berada kampung.
- c. Ekonomi Lokal
 - ❖ Terselenggaranya penguatan kelembagaan ekonomi;
 - ❖ Meningkatnya pengembangan agro industri kampung;
 - ❖ Meningkatnya pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya di kampung.

- d. Transportasi
 - ❖ Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pembangunan prasarana dan penyediaan sarana angkutan transportasi diseluruh wilayah.
- e. Perumahan dan permukiman
 - ❖ Meningkatkan pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat di kampung dan daerah terpencil/perbatasan beserta prasarana dan sarana dasarnya;
 - ❖ Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan melalui pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
- f. Pemberdayaan Perempuan
 - ❖ Meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - ❖ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
 - ❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, dalam rangka mempertinggi kualitas hidup dan SDM perempuan;
 - ❖ Memperkuat kelembagaan perempuan.
- g. Energi
 - ❖ Pemenuhan kebutuhan energi terutama di kampung dan daerah terpencil dalam jumlah memadai dan berkesinambungan, melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi yang terbarukan;
 - ❖ Meningkatkan pemenuhan ketenagalistrikan di kampung dan daerah terpencil/perbatasan sebesar persen.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan yang ditempuh pada upaya keberpihakan terhadap masyarakat kampung, daerah terpencil dan perbatasan melalui prioritas kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung

1. Peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan Strategi pembangunan Kampung (RESPEK) melalui pemberian bantuan (grant) setiap kampung dengan target semua kampung di Provinsi Papua, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan PNPM Mandiri Respek, penguatan kelembagaan PNPM Mandiri Respek seperti sosialisasi dan pelatihan, Penyusunan Indikator Pelaksanaan Respek, Evaluasi pelaksanaan Respek;
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, melalui pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi yang bermutu, peningkatan pelayanan pendidikan dasar, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan peningkatan ekonomi produktif berbasis SDA dan budaya, penataan permukiman dan lingkungan sehat secara partisipatif, penjaminan rasa aman dan damai, peningkatan kualitas kehidupan rohani, peningkatan peran perempuan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perbaikan dan peningkatan prasarana dasar (transportasi, air bersih, MCK, energi/Listrik, telekomunikasi dan Sitel) serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
3. Optimalisasi fungsi kemitraan lembaga agama, adat dan pemerintah.

Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir

1. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial bagi anak, usia lanjut dan penyandang cacat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan, pemberdayaan serta aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial
4. Peningkatan pengembangan kawasan tertinggal, terisolir dan perbatasan.

Peningkatan Ekonomi Lokal

1. Penyediaan dana untuk kegiatan produktif skala usaha mikro termasuk pengusaha perempuan asli Papua;
2. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha asli Papua;
3. Pembinaan UMKM bagi orang asli Papua;
4. Pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya pelaku usaha perikanan dan pesisir;
5. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
6. Percepatan pembangunan kawasan produksi;
7. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan;
2. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak;
3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

1. Pengembangan dan pemanfaatan energi seperti pemanfaat biofuel dan energi terbarukan;
2. Penyediaan energi listrik dikampung;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan, penataan rumah sebanyak 500 unit;
4. Fasilitasi dan stimulasi prasarana dan sarana dasar permukiman sebanyak 100 unit;
5. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan sebanyak 100 kampung;
6. Pembangunan jalan kampung dan kawasan perbatasan;
7. Subsidi pelayaran perintis;
8. Pengadaan sarana transportasi darat dan laut.

2. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dengan memberikan perhatian luas pada upaya Peningkatan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Sasaran

a. Pendidikan

- ❖ Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD menjadi 95 persen; meningkatnya APM jenjang SMP menjadi 55 persen;
- ❖ Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APM jenjang SMA menjadi 36;
- ❖ Meningkatnya partisipasi di semua jenjang pendidikan melalui pelayanan pendidikan secara cuma-cuma;
- ❖ Menurunnya angka putus sekolah;
- ❖ Meningkatnya angka melek huruf (AMH) menjadi 95 persen; dan angka buta huruf (ABH) menjadi 5 persen;
- ❖ Peningkatnya proporsi pendidik dengan murid; dan meningkatnya proporsi murid dengan sekolah, serta meningkatnya kesejahteraan guru.

b. Kesehatan

- ❖ Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 60 persen;
- ❖ Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua secara cuma-cuma pada setiap strata pelayanan;
- ❖ Menurunnya prevalensi kurang Gizi pada balita;
- ❖ Tersedianya jumlah tenaga kesehatan di semua tempat pelayanan kesehatan;
- ❖ Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular terutama HIV/AIDS dan penanganan wabah penyakit pada kejadian luar biasa (KLB);

❖ Meningkatnya...../35

- ❖ Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ART) menjadi 100 persen;
- ❖ Meningkatnya kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- ❖ Meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan;
- ❖ Meningkatnya dan meratanya kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan;
- ❖ Revitalisasi fungsi puskesmas dan posyandu.

Arah Kebijakan

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan maka kerangka arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut :

Pendidikan

1. Melaksanakan pendidikan anak usia dini melalui pembentukan dan penguatan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Mempercepat penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pembebasan biaya sekolah bagi siswa asli Papua;
4. Peningkatan kesempatan belajar ke perguruan tinggi yang bermutu melalui kerjasama dan pemberian beasiswa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan disemua jenjang pendidikan;
6. Meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah
7. Melaksanakan penuntasan buta aksara
8. Meningkatkan minat baca masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan, bahan bacaan dan pustakawan
9. Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi kepemudaan
10. Meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyediaan sarana prasarana olah raga

Kesehatan

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara merata sampai ke kampung-kampung terpencil, melalui revitalisasi fungsi Posyandu, pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin asli Papua di semua jenjang pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
2. Mendukung tersedianya makanan dan gizi yang menjangkau masyarakat kampung, melalui penanganan gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 60%;
4. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular, melalui pemberantasan dan pencegahan penyakit menular khususnya HIV/AIDS;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis, melalui pemenuhan kebutuhan tenaga dokter, perawat dan bidan terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, pemenuhan tenaga dokter spesialis di RS yang ada;
6. Peningkatan pemanfaatan obat melalui penyediaan obat generik esensial (*buffer stock*).

3. Pengembangan Perekonomian Rakyat dengan komoditas-komoditas berorientasi pasar yang didukung oleh Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Daya Tarik Investasi

Sasaran

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas pengembangan perekonomian rakyat dengan komoditas-komoditas yang berorientasi pasar dengan nilai jual yang tinggi yang didukung oleh pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan daya tarik investasi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ;
- b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
- c. Meningkatnya produksi perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan ditandai meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB tahun 2010;
- d. Menurunnya kasus illegal logging serta berkembangnya industri perikanan;
- e. Tumbuhnya industri pengolahan sub sektor UMKM;
- f. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesinambungan, yang ditandai terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan, menurunnya tingkat pengrusakan lingkungan dan pelestarian flora dan fauna yang dilindungi.

Arah Kebijakan

Peningkatan Daya Tarik Investasi, Perdagangan, Pariwisata serta Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum;
2. Revitalisasi kelembagaan investasi sebagai lembaga perencana dan pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi, dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing;
3. Optimalisasi penyederhanaan sistem dan prosedur perijinan melalui pelayanan satu pintu;
4. Mendorong pertumbuhan industri untuk penciptaan lapangan kerja;
5. Pengembangan industri kecil dan menengah melalui Pelatihan kerajinan kerang-kerangan, batu-batuan, anyaman dan noken, ukiran tradisional dan kulit kayu, Pelatihan Pembuatan Minyak buah merah dan minyak kelapa rakyat, Pelatihan Industri pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan, Pelatihan Industri pengolahan hasil laut dan perikanan, Pelatihan Pengolahan industri sagu, Penyuluhan kebijaksanaan industri dan dagang kecil, Identifikasi KUB/Wirausaha baru dalam rangka pembuatan data base IKDK, Bantuan modal kerja, sarana dagang kecil dan pelatihan PKL Putra Daerah, Pemagangan dan pendampingan
6. Penguatan struktur industri dan peningkatan nilai tambah industri berbasis sumber daya lokal;
7. Pengembangan sentra-sentra industri yang potensial melalui Pengembangan industri kerajinan kulit reptil, meubel kayu, rotan dan bambu, dan aneka souvenir dari kayu dan batang kelapa, Pengembangan industri rumah knock down, Pengembangan industri kopi dan kakao, Pengembangan pengolahan industri minyak atsiri, Pengembangan industri pakan ikan dan ternak, Pengembangan industri minyak jarak, Pengembangan industri batik Papua, Pengembangan industri kerajinan aluminium, kaca dan plastik, Pengembangan industri galangan kapal dan kapal/perahu rakyat, Pengembangan SDM di bidang wirausaha, Bantuan modal dan peralatan, Pemagangan dan tenaga pendampingan
8. Peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa dengan pendekatan supply terutama kebutuhan pokok masyarakat;
9. Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis SDA dan produk unggulan daerah;
10. Penciptaan dan menggerakkan iklim investasi bidang pariwisata yang kondusif;

11. Peningkatan potensi obyek wisata unggulan, diversifikasi produk pelayanan jasa pariwisata dan peningkatan SDM pariwisata dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing;
12. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam kegiatan pariwisata;
13. Mengembangkan program-program pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, bermutu dan tepat guna.

Pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengembangan Usaha kecil dan menengah melalui Pengembangan Small Business Incubators, Pengembangan dan perluasan penjaminan kredit UKM, Pembantuan promosi produk KUKM, Pengembangan kemitraan usaha, Pengembangan kerja sama pembinaan KUKM, Pengembangan kemitraan dengan lembaga donor luar negeri, Penguatan modal KUKM;
2. Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah melalui Sosialisasi Kebijakan & program pengembangan usaha koperasi kepada investor/ pengusaha, tokoh, adat, Sosialisasi Perkoperasian, Workshop pengembangan Skill UKM, Pertemuan informal " SMEs and Coop Monday Morning, Pengembangan klinik konsultasi business, Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi, Pengembangan dan pembinaan wirausaha baru, Pembentukan Tim pengembangan dan kajian UMKM antara Pemerintah, KADIN, Asosiasi pengusaha dan lembaga terkait lainnya;
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui Pengembangan unit-unit sektor unggulan daerah, Peningkatan kemitraan dengan LSM Internasional di bidang Koperasi, Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk koperasi, Penguatan manajemen usaha koperasi dalam pengembangan komoditas, Peningkatan Akses Pasar bagi komoditas Koperasi, Pengembangan Koperasi kawasan Kapet, Pengembangan promosi produk UKM orientasi export, Promosi potensi unggulan daerah dan kampung di tingkat Provinsi

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pembangunan Pertanian:

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian dan fungsi Pertanian;
2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian melalui Pengembangan Tanaman Buah, Sayuran, dan tanaman Biofarmaka, Pengendalian OPT hortikultura dan Pengamanan / Pengawasan produk hortikultura; Pengembangan BBI hortikultura Wirmaker Biak; Pengembangan Perbenihan Hortikultura; Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan; Penyediaan sarana produksi perkebunan; Pengembangan bibit unggulan perkebunan dan Sertifikasi bibit unggulan/perkebunan;
3. Pengembangan komoditi pertanian bernilai ekonomi tinggi melalui pengembangan perkebunan komersial (bahan baku energi) dan pengembangan perkebunan rakyat;
4. Pengembangan Perbenihan tanaman pangan, Pengembangan instalasi BBI Tanaman, Pengembangan BBI Padi, pengembangan BBI Palawija, Pengembangan Intensifikasi, Extensifikasi dan rehabilitasi, Pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, Perbaikan sistem penggunaan lahan, Fasilitasi analisa ekonomi usaha tani komoditi tanaman pangan dan hortikultura di tingkat petani.
5. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi dan Pasca Panen Pertanian/ Perkebunan melalui Peningkatan Usaha Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, Peningkatan jiwa kewirausahaan dan kemitraan usaha, Pemantauan harga pasar, analisa pengolahan dan penyebaran data pemasaran dan bantuan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan kepada petani, Promosi atas hasil produksi TPH/perkebunan unggulan daerah, Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan

Pembangunan Tanaman Perkebunan

1. Pengembangan produk bio fuel sebagai sumber energi alternatif;
2. Peningkatan kemampuan petani perkebunan serta penguatan lembaga pendukungnya;

Pembangunan Ketahanan Pangan

1. Memantapkan ketersediaan pangan di rumah tangga, daerah dan wilayah;
2. Meningkatkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal yang beragam, bermutu dan bergizi untuk mengantisipasi kerwanan pangan;
3. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan;
4. Memantapkan kelembagaan ketahanan pangan, revitalisasi sistem penyuluhan ketahanan pangan, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha kecil.

Pembangunan Peternakan

1. Peningkatan hasil produksi peternakan melalui Peningkatan sarana dan prasarana peternakan, Peningkatan kualitas produksi bibit babi lokal, Pengembangan agribisnis peternakan, Pengembangan perbibitan ternak rakyat, Standarisasi mutu ternak babi, Pengembangan kawasan peternakan, Pengendalian pemotongan betina produktif, Pembinaan & pengembangan budidaya ternak unggas, babi, kambing, sapi dan rusa
2. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan melalui Promosi produk hasil peternakan melalui kegiatan nasional maupun daerah, Sosialisasi pembangunan peternakan dan sosialisasi kredit usaha kecil dan menengah, Pembinaan pasca panen hasil peternakan dan Pelayanan Informasi pasar;

Pembangunan Perikanan dan Kelautan

1. Pengembangan budidaya perikanan melalui Pengembangan bibit ikan unggul, Pendampingan kelompok pembudidaya, Pembinaan dan pengembangan prasarana budidaya;
2. Peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, melalui Penyuluhan/Pelatihan budidaya laut, Budidaya Komoditi laut unggulan;
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pendampingan Pelaksanaan Program Mitra Bahari, Dukungan Kegiatan Cooremap, Budidaya Sistem Wanamina di kawasan bakau;
4. Pengembangan perikanan tangkap melalui Pendampingan pada kelompok nelayan, Pembangunan prasarana perikanan tangkap, Operasional prasarana perikanan tangkap, Rehabilitasi prasarana perikanan tangkap, Pengembangan lembaga usaha perikanan tangkap;
5. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan melalui Kajian sistem penyuluhan perikanan, Pelatihan Tenaga Pendamping Teknis, Revitalisasi Penyuluhan.

Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui Pengembangan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan budidaya hasil hutan bukan kayu, Pengelolaan hutan di wilayah perbatasan RI-PNG, Pengendalian dan pengawasan produksi dan sarana produksi hasil hutan, Pengendalian dan Pengawasan peredaran hasil hutan, Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Sistem TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) pada HPH, Pembangunan dan pengembangan industri kayu rakyat, Optimalisasi industri perkayuan terpadu, Pameran dan promosi sektor kehutanan, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui Peningkatan kemampuan teknis kehutanan Masyarakat Adat, Evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan pembangunan kehutanan, Pengembangan sosialisasi dan penyuluhan di bidang kehutanan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pengembangan Sistem Informasi Manajemen berbasis Teknologi Informasi, Pengembangan sistem pemantauan peredaran hasil hutan berbasis teknologi informasi, Pengembangan procurement system sektor kehutanan, Pengembangan perencanaan bersama Masyarakat kampung dalam pengelolaan hutan, Pengembangan sistem pendampingan pengelolaan hutan, Pengembangan sistem insentif aparatur, Pengembangan data dan informasi pembangunan kehutanan, Pengembangan sarana dan prasarana

4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi, Sasaran

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi dalam menghubungkan kawasan pegunungan tengah, serta pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan tumbuh cepat, dalam suatu sistem transportasi terpadu;
- b. Meningkatkan prasarana dalam penyediaan energi yang murah bagi masyarakat
- c. Meningkatkan pemenuhan air bersih dan sanitasi lingkungan di seluruh wilayah;
- d. Meningkatkan jangkauan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut :

Bidang Transportasi

Pembangunan Transportasi Darat

1. Pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan, menggunakan pendekatan pengembangan Kawasan (HUB) melalui pembangunan jalan kawasan pengembangan I, II, III, IV dan V;
2. Pembangunan Fasilitas prasarana dan Sarana fasilitas perhubungan Darat melalui Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Darat, Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat, Pembangunan terminal antar kota sesuai kebutuhan, Pembangunan Halte Bus, Pembangunan pergudangan sesuai kebutuhan, Pemasangan pagar pengaman jalan, Pemasangan rambu-rambu lalu lintas darat;

Pembangunan Transportasi Laut

1. Mengembangkan prasarana dan fasilitas perhubungan laut melalui pembangunan prasarana dan Sarana Fasilitas perhubungan laut, menggunakan pendekatan Kawasan Pengembangan (HUB); Peningkatan pelayanan angkutan Laut melalui Meningkatkan fasilitas pelabuhan, Menetapkan Perdasí tentang kepelabuhanan, Memberikan kemudahan kepada pihak swasta untuk investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana perhubungan laut, Pengadaan Kapal, Mengembangkan pelayaran rakyat, Membangun fasilitas container Pembangunan fasilitas lalu lintas laut melalui Penetapan lokasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas perhubungan laut, Pembangunan rambu-rambu lalu lintas laut, Membangun pos-pos pemantauan dan pengawasan pelayaran, Pelatihan tim SAR, Penempatan Tim SAR pada pos-pos pemantauan dan pengawasan pelayaran.

Pembangunan Transportasi Udara

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan udara yang mampu mendukung peningkatan akses ke daerah terpencil melalui pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan udara, pembangunan dan Peningkatan prasarana, Sarana dan fasilitas Perhubungan Udara; Bekerjasama dengan pihak swasta nasional dan internasional dalam mengembangkan jalur-jalur penerbangan internasional; Mendorong pihak swasta untuk investasi pada penyediaan depot-depot bahan bakar melalui Pengembangan sistem transportasi dengan melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pengembangan bandara internasional, Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta untuk mendukung pelaksanaan penerbangan internasional, Penyusunan Perdas/Perdasus tentang insentif bagi pelayanan penerbangan ke daerah terpencil, Dukungan kepada swasta untuk melakukan penerbangan ke daerah terpencil, Berkoordinasi dengan pihak BUMN dan swasta untuk pengembangan agen-agen BBM untuk mendukung penerbangan di daerah terpencil, Pembangunan depot-depot BBM di Dekai, Tanah Merah, Oksibil, Wagete dan Koweda.

Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Peningkatan pelayanan ASDP melalui Pembangunan Pelabuhan Logpon di Kab. Yahukimo, Pembangunan Pelabuhan Tanah Merah Boven Digoel, Pembangunan Pelabuhan Keppi Kabupaten Mappi, Pembangunan Pelabuhan Asmat, Pengadaan kapal yang sesuai dengan spesifikasi dan kondisi sungai dan danau, Pelatihan sumberdaya manusia untuk mengoperasikan, merawat dan memperbaiki armada pelayaran sungai, Membangun sistem peringatan dini untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, Membangun pos-pos pemantauan dan pengawasan keselamatan pelayaran sungai dan danau, Melatih dan menempatkan Tim SAR pada pos-pos pemantauan dan pengawasan

Pembangunan Prasarana Air Bersih

Penyediaan dan Pengelolaan air bersih melalui Pembangunan instalasi penyediaan air bersih untuk peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih; Perlindungan kawasan tangkapan air melalui penguatan tentang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten/Kota, penegakan hukum untuk mendukung perlindungan kawasan tangkapan air.

Pembangunan Bidang Energi

Pengembangan energi murah bagi masyarakat melalui melakukan survei dan studi kelayakan terhadap sumber-sumber energi murah yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi permukimannya, pengadaan solar cell dan mikro hidran (PLTA mini) untuk kebutuhan masyarakat di kampung-kampung, pembangunan PLTM di Oksibil, Paniai, Mulia dan Tolikara; Penyediaan energi bagi kebutuhan pembangunan industri melalui studi kelayakan pembangunan PLTA skala besar seperti potensi Sungai Membramo, Danau Paniai, Sungai Digul, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pengembangan industri, pembangunan PLTA skala besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri dan energi murah.

Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan dan penyediaan jasa telekomunikasi melalui pembangunan sarana prasarana telekomunikasi hingga menjangkau wilayah distrik dan kampung, Membangun pemancar telekomunikasi pada beberapa lokasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Provinsi Papua; bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan fungsi-fungsi jasa telekomunikasi dan penyediaan sumber daya manusia untuk mengembangkan jasa telekomunikasi hingga ke distrik dan kampung

5. **Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Ketentraman, Supremasi Hukum dan Penegakan HAM**
Sasaran

a. Menurunnya...../41

- a. Menurunnya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya kinerja birokrasi, yang ditandai ditingkatkannya kualitas pelayanan Publik dan peningkatan kinerja SKPD serta unit kerja daerah, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan untuk mendukung kinerja SKPD dan pembangunan.
- c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM, yang ditandai menurunnya indeks kriminalitas, peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.

Arah Kebijakan

Operasi Pemberantasan KKN

1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas melalui meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan, mengembangkan penerapan dan pengawasan yang berbasis kinerja, mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja, penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
2. Peningkatan pengaduan masyarakat melalui Pembentukan unit khusus penanganan dan pengaduan masyarakat.

Mendorong berfungsinya lembaga-lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bekerja secara optimal

1. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;
2. Peningkatan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui Peningkatan kesejahteraan aparat pengawas, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, penataan Kelembagaan, penataan Sistem Informasi Pengawasan, peningkatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan peningkatan Koordinasi Pengawasan.

Pembenahan Sistem Pemerintahan daerah

Arah kebijakan dalam pembenahan sistem pemerintahan daerah adalah

1. Peningkatan pemerintahan yang baik melalui peningkatan Pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, menerapkan nilai-nilai etika aparatur yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam rangka pemberian pelayanan masyarakat
2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui mengembangkan standar kinerja pelayanan publik, memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik, mengembangkan mekanisme capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada publik, mengembangkan mekanisme kontrak kinerja setiap Satuan Kerja, dan mengembangkan penerapan standar akuntabilitas kinerja;
3. Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa melalui Penyusunan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
4. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui Penataan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, pengembangan transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), Intenfikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pembinaan Kesadaran hukum Masyarakat untuk Hidup Tertib, Teratur, Disiplin dan Taat pada Hukum

1. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan keamanan melalui Pembentukan PAM Swakarsa, pembinaan Siskamling dan pembinaan Kamtibmas;
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal melalui peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan, peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan Swakarsa;

Membina masyarakat untuk hidup rukun dan damai penuh persaudaraan di antara sesama anak bangsa, menghargai hak-hak azasi manusia dan menghargai hak-hak khusus dari penduduk asli

1. Peningkatan perlindungan HAM melalui Peningkatan Peran Komnas HAM Papua, Fasilitasi penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM, Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
2. Peningkatan perlindungan hak-hak khusus penduduk asli Papua melalui Pengarus-utamaan hak-hak penduduk asli dalam pembangunan, Sosialisasi hak-hak khusus penduduk asli, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang memperhatikan hak-hak khusus penduduk asli;
3. Peningkatan pengembangan nilai budaya melalui Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang kebudayaan, dan pemetaan budaya suku bangsa Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dan dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan tahun 2010 yang telah dikemukakan di atas, maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Papua yang damai, sejahtera dan aman serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua, strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dengan penekanan pada prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (Growth Centered Development).
 - a. Pengembangan Perekonomian Rakyat dengan Komoditas-Komoditas Berorientasi Pasar yang didukung oleh Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Daya Tarik Investasi.(Prioritas II)
 - b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi (Prioritas IV).
2. Pembangunan yang bertumpu pada rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development).
 - a. Peningkatan Pembangunan Kampung (Prioritas II).
 - b. Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan.(Prioritas II).

3. Menjaga dan memelihara stabilitas pembangunan (Development Stability) dan kesinambungan pembangunan (Development continuity).

a. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Ketentraman, Supremasi Hukum dan Penegakan HAM.(Prioritas I dan III)

Prioritas pembangunan daerah tahun 2010 tersebut harus dilaksanakan secara sinergis baik antar sektor pembangunan, antar pelaku pembangunan maupun antar wilayah. Dari sisi kewilayahan, program-program prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada wilayah sasaran yang terdiri dari:

1. Kampung sebagai pusat pertumbuhan
2. Daerah perbatasan
3. Daerah terisolir dan terpencil
4. Kawasan andalan
5. Daerah Rawan Bencana

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari 4(empat) agenda pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011 ke dalam Prioritas pembangunan tahun 2010, Rincian Program, Sasaran Program, SKPD penanggung jawab dan Pagu indikatif masing-masing Program dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut :

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2010 merupakan penjabaran dari RPJM Provinsi Papua dan RPJM Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, masalah dan tantangan pembangunan tahun 2010, prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pendanaan indikatif.

RKPD Provinsi merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, RKPD kabupaten/kota serta pedoman penyusunan RAPBD Provinsi tahun 2010. Untuk itu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. SKPD Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten kota serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan yang terkait dengan RKPD tahun 2010 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD tahun 2010 dan sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dikukuhkan melalui nota kesepakatan antar pimpinan DPRP dan Gubernur Provinsi Papua;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD maupun dari APBN/DAK, maka setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) tahun 2010 berdasarkan PPAS RAPBD;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musrenbang untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan;
6. Untuk menjaga efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan;
7. Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing kepala SKPD;
8. Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2010
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode tahun 2011.

Dengan adanya RKPD Provinsi Papua, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi daerah serta arah kebijakan pembangunan yang memperhatikan status fungsi dan beban yang di emban oleh kabupaten/kota, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

RKPD tahun 2010 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Langkah-langkah persiapan di mulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Papua tahun 2010 tergantung pada sikap mental, takad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat Papua pada umumnya.

Dalam hal ini seluruh penyelenggara pemerintahan dan dukungan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD tahun 2010 ini agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.K.H ROEMBIAK